


# KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



## KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK KEMENTERIAN PERTANIAN RI

19 JUNI 2024

-Biro Humas dan Informasi Publik-

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Perubahan Iklim Semakin Mengancam Produktivitas Pangan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024   |  |
| Media  | Koran Jakarta  |  |
| Page   | 1  |  |
| Author | YK/ers/SB/E-9  |  |

Pemanasan Global | Beberapa Tanaman Bisa Lebih Tahan terhadap Cuaca Ekstrem

# Perubahan Iklim Semakin Mengancam Produktivitas Pangan

» Kebergantungan yang berlebihan pada satu atau dua jenis tanaman membuat kita rentan terhadap gangguan produksi yang disebabkan oleh cuaca ekstrem atau bencana alam lainnya.

JAKARTA - Perubahan iklim semakin mengancam produktivitas pangan di berbagai belahan dunia. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai belahan dunia lainnya termasuk di negara-negara produsen pangan, seperti Tiongkok dan India yang menjadi barometer pertanian dunia, tidak luput dari cuaca panas ekstrem dan kekeringan.

Guru Besar Ekonomi Pertanian dari UGM, Dwijono Hadi Darwanto, di Yogyakarta, Selasa (18/6), mengakui perkiraan cuaca dengan kekeringan memang mengancam negara-negara penghasil bahan pangan. Tidak hanya itu, di dalam negeri sendiri, selain kekeringan di sebagian daerah penghasil pangan, di beberapa daerah seperti Pantai Utara Jawa (Pantura) malah dilanda banjir. Kondisi tersebut jelas akan mengancam rendahnya tingkat produktivitas dan produksi pangan terutama beras.

"Dalam kondisi produk domestik yang menurun dan juga penurunan produksi maka diperkirakan impor juga sangat-sangat terbatas, sehingga tidak akan mampu bertahan kalau tidak melakukan diversifikasi berbasis pangan

lokal. Tentu harus diolah lebih praktis sehingga lebih mudah diakses konsumen dalam negeri," kata Dwijono.

Dalam situasi kritis seperti sekarang, sangat penting segera mengenalkan kepada masyarakat sebagai konsumen tentang diversifikasi bahan makanan. Diversifikasi konsumsi berarti memperluas jenis bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat sehingga tidak hanya bergantung pada beras dan gandum saja.

Beberapa alasan mengapa diversifikasi konsumsi perlu segera diterapkan di antaranya dengan mengonsumsi berbagai jenis bahan pangan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. "Kebergantungan yang berlebihan pada satu atau dua jenis tanaman membuat kita rentan terhadap gangguan produksi yang disebabkan oleh cuaca ekstrem atau bencana alam lainnya," jelas Dwijono.

Selain itu, diversifikasi konsumsi juga memberikan manfaat gizi yang lebih baik bagi masyarakat. "Dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan, kita dapat memastikan asupan nutrisi yang lebih seimbang dan lengkap, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dengan mempromosikan berbagai jenis tanaman pangan maka secara tidak langsung dapat mendukung petani lokal yang menanam tanaman selain beras dan gandum. Pendapatan petani pun akan meningkat sembari mengurangi kebergantungan pada impor pangan.

"Diversifikasi konsumsi juga merupakan strategi adaptasi yang efektif

terhadap perubahan iklim. Beberapa tanaman mungkin lebih tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem dibandingkan yang lain, sehingga dapat menjadi alternatif yang lebih andal dalam menghadapi tantangan perubahan iklim," papar Dwijono.

Pada kesempatan yang berbeda, Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, mengatakan Tiongkok saja yang sudah lama melakukan investasi besar-besaran untuk merespons perubahan iklim, pada akhirnya juga menghadapi tantangan perubahan iklim.

Mereka sudah mengembangkan infrastruktur dan teknologi, salah satunya dengan merekayasa sungai dan bendungan yang memadukan antara kebutuhan pangan dan energi secara terpadu.

"Rekayasa lain penerapan masif teknologi *drip irrigation* (irigasi tetes) untuk lahan kering dan kritis. Namun, bukan berarti bisa menyelesaikan masalah 100 persen, hanya mengurangi risikonya saja sehingga lebih moderat," kata Hafidz.

Sampai saat ini, Tiongkok masih sangat bergantung pada ekosistem perdagangan untuk pemenuhan pasokan pangan domestiknya yang besar, sembari mempertahankan insentif-insentif bagi sektor pertanian secara masif, termasuk memperkenalkan sistem *local food*-nya.

Untuk masalah iklim, lanjut Hafidz, prinsipnya perlu adaptasi dan tidak ada solusi instan yang bisa ditawarkan. Maka, perpaduan antara rekayasa teknis, pemanfaatan data-data cuaca yang presisi, serta penguatan kelembagaan dan pengetahuan di tingkat pelaku

usaha pertanian, perikanan, perkebunan menjadi kuncinya.

## Kekeringan Parah

Seperti diberitakan sebelumnya, Tiongkok tengah dilanda cuaca ekstrem karena kekeringan parah dan suhu tinggi, menghanguskan wilayah utara, sementara hujan lebat menggenangi wilayah selatan, meningkatkan kekhawatiran mengenai ketahanan pangan di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.

Daerah-daerah di negara yang menghasilkan banyak beras dan gandum terkena dampak buruk sehingga mengganggu musim tanam di musim semi dan musim panas.

Kementerian Pertanian Tiongkok, mengatakan bahwa kekeringan dan panas berdampak buruk pada musim tanam di beberapa provinsi utara dan tengah, dan memperingatkan bahwa suhu diperkirakan akan melampaui 35 Celsius (95 Fahrenheit) dalam beberapa hari mendatang.

Dikutip dari *Cable News Network* (CNN), peringatan darurat dikeluarkan mencakup setidaknya tujuh provinsi, termasuk wilayah pertanian utama Henan dan Shandong, sudah diberlakukan karena kondisi kering dan panas.

Suhu yang terus-menerus tinggi baru-baru ini telah mempercepat hilangnya air di dalam tanah dan (menyebabkan) kekeringan di beberapa daerah, yang berdampak negatif pada musim tanam di musim panas," kata Kementerian itu dalam sebuah pernyataan. ■ YK/ers/SB/E-9

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN


|        |                      |  |
|--------|----------------------|--|
| Title  | Terdampak Cuaca      | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024         |  |
| Media  | Koran Jakarta        |  |
| Page   | 5                    |  |
| Author | Antara/Basri Marzuki |  |

## »» Terdampak Cuaca



ANTARA/BASRI MARZUKI

»» Seorang anak memisahkan kotoran dari ebi (udang kering) yang dijemur di Pantai Kampung Lere, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (18/6). Anomali cuaca yang terjadi sepekan terakhir di wilayah itu mendorong harga ebi dari 30 ribu rupiah menjadi 50 ribu rupiah per kilogram karena pengeringan yang hanya mengandalkan sinar matahari terkendala hujan yang tidak menentu.

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Flu Burung Semakin Menyebar ke Peternakan Unggas di Australia | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024  |  |
| Media  | Koran Jakarta   |  |
| Page   | 12  |  |
| Author | SB/YK/N-3   |  |

## Penyakit Menular

# Flu Burung Semakin Menyebar ke Peternakan Unggas di Australia

CANBERRA - Pemerintah negara bagian Victoria, Australia, pada Senin (17/6), mengatakan flu burung yang sangat patogen telah menyebar ke peternakan unggas ketujuh di dekat Melbourne.

Enam dari properti tersebut memiliki *strain* flu H7N3 dan properti ketujuh memiliki *strain* H7N9. Begitu pula dengan flu burung jenis H5N1 yang telah menginfeksi miliaran hewan liar dan hewan ternak secara global dan menimbulkan kekhawatiran akan penularannya ke manusia.

"Area pembatasan dan pengendalian diberlakukan di sekitar semua lokasi yang terinfeksi," kata Departemen Per-

tanian Victoria dalam sebuah pernyataan.

Dikutip dari *The Straits Times*, properti yang terinfeksi termasuk enam peternakan telur dan satu peternakan bebek. Sekitar satu juta ayam atau sekitar 5 persen dari kawanan ayam petelur di Australia, telah atau akan dibunuh di peternakan yang terkena dampak virus ini untuk membendung virus.

### Membatasi Pembelian

Saat ini belum terjadi kekurangan telur meskipun beberapa pengecer telah membatasi pembelian. Pihak berwenang mengatakan telur dan daging bebek dan ayam

tetap aman dikonsumsi.


"Sebelum kasus terbaru ini, yang pertama kali dilaporkan bulan lalu, Australia telah mengalami sembilan wabah flu burung yang sangat patogen sejak tahun 1976. Semuanya dibendung dan diberantas," kata pemerintah.

Sebelumnya, seperti dikutip dari *Antara*, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Tjandra Yoga Aditama, menyarankan agar konsep satu kesehatan (*one health*) diterapkan secara nyata untuk merespons kasus kematian perdana pada manusia akibat penyakit flu burung (H5N2).

"Sehubungan kewaspada-

an yang disampaikan WHO tentang meninggalnya kasus pertama akibat penyakit flu burung maka perlu kita ketahui flu burung adalah salah satu penyakit infeksi yang punya potensi menimbulkan wabah, dan bahkan bukan tidak mungkin menyebar antar-negara," kata Tjandra.

Ia mendorong agar Indonesia mewujudkan penerapan konsep *one health* dalam pelayanan kesehatan yang nyata di lapangan, jangan hanya berupa panduan kebijakan saja. "*One health* adalah kerja bersama kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan," katanya. ■ SB/YK/N-3

|        |                                     |  |
|--------|-------------------------------------|--|
| Title  | Bansos Sulit Atasi Kerawanan Pangan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                        |  |
| Media  | Koran Jakarta                       |  |
| Page   | 6                                   |  |
| Author | Ers/E-10                            |  |

Pengentasan Kemiskinan | Pembenahan Tata Niaga Beras lebih inklusif Perlu Dilakukan

## Bansos Sulit Atasi Kerawanan Pangan

Dalam tata niaga beras tersentral seperti saat ini, peran pemerintah dalam kontrol harga dengan buka tutup kran impor berbasis kuota, bahkan saat panen raya, seringkali memojokkan posisi petani sebagai produsen.

JAKARTA – Program bantuan sosial (bansos) berupa beras dinilai tak akan menyelesaikan permasalahan kerawanan pangan. Karena itu, optimalisasi konsep pangan lokal atau *local food* menjadi solusi tepat untuk mengatasinya.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, menilai konsep kerawanan pangan akibat kemiskinan ekstrem lebih disebabkan ketergantungan terhadap komoditas beras. Kerawanan pangan rentan di berbagai daerah yang defisit beras, bukan penghasil, khususnya kawasan Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara (NTT), Maluku, Papua, dan sebagian area Kalimantan.

Di sisi lain, lanjutnya, pen-

duduk di wilayah Sumatera-Jawa dan Sulawesi mempunyai stok beras cukup berlimpah dan risiko kerawanan pangan tak tampak serius, terlebih lagi dengan sistem distribusi yang cukup masif.

"Kelompok paling miskin akan membeli beras untuk kebutuhan reguler harian, pendapatannya yang minim tidak memungkinkannya untuk membeli skala bulanan, maka mereka akan membeli dalam kondisi fluktuasi harga, termasuk saat harga tinggi atau bahkan ketika stok langka seperti awal tahun ini, mereka kehilangan akses terhadap beras," tegas Hafidz kepada *Koran Jakarta*, Selasa (18/6).

Di luar 10 persen masyarakat termiskin, lanjutnya, pem-

benahan tata niaga beras lebih inklusif perlu dilakukan. Dia memcontohkan Tiangkong memberikan subsidi dengan konsep *local food*. Dalam konsep ini, beras yang didistribusikan untuk masyarakat di radius kurang dari 100 kilometer (km) mendapatkan subsidi. Hal itu menjadi insentif bagi produsen, khususnya petani, untuk mengembangkan produk beras lokalnya masing-masing yang dapat mendorong swasembada.

"Saat ini, tata niaga beras (di Indonesia) tersentral. Meskipun banyak pelaku usahanya, tetapi kebijakannya tunggal dan peran pemerintah dalam kontrol harga dengan buka tutup kran impor berbasis kuota sering kali memojokkan posisi petani bahkan kran impor sering dibuka justru menjelang panen raya di beberapa daerah sehingga harga jual gabah di tingkat petani jatuh," jelasnya.

Sebaliknya, para distributor besar diuntungkan karena mereka memiliki fleksibilitas antara mendistribusikan beras lokal ataupun mengakses beras impor yang lebih murah.

"*Local food* akan menjadi solusi, terlebih jika pemerintah serius merevitalisasi peran Koperasi Unit Desa yang diarahkan untuk memperkuat sistem produksi dan distribusi produksi pertanian, khususnya beras maka akan sangat mungkin kita keluar dari dilema krisis pangan bersamaan dengan kesejahteraan petani yang meningkat," ungkap Hafidz.

Senada, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta YB Suhartoko mengatakan pemberian bantuan pangan kepada keluarga rawan pangan dalam jangka sangat pendek memang akan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun, kebijakan itu bisa berdampak sementara, apabila tidak dicari akar masalahnya.

Menurutnya, penyebab kemiskinan ekstrem bukan sekedar pendapatan saja, tetapi akses pasar, biaya yang tinggi mencapai tempat kerja, jumlah tanggungan keluarga, lingkungan yang tidak sehat, ketrampilan yang dimiliki dan berbagai variabel lain.

"Karena itu pendekatan terhadap kelompok rawan pangan jangan sekedar karitatif saja yang juga menimbulkan risiko ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Keluarga rawan pangan perlu ditingkatkan menjadi keluarga yang mandiri," tegas Suhartoko.


Peran pemerintah dalam hal ini menurutnya lebih pada fasilitator, pendampingan dan konsultasi. "Kelembagaan masyarakat yang bersifat gotong royong perlu didorong untuk menjadi katalisator perubahan masyarakat," ucapnya.

### Gencarkan Intervensi

Seperti diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia dengan menggenapkan intervensi pengendalian kerawanan pangan kepada keluarga rentan.

"Intervensi pengendalian kerawanan pangan dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan kepada keluarga rawan pangan, yaitu kelompok pengeluaran 10 persen terbawah/desil 1 sebagai sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu pekan lalu.

Arief menyampaikan Bapanas mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 melalui kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan yang diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen. ■ **ers/E-10**

|        |                          |  |
|--------|--------------------------|--|
| Title  | EBT MAGNET INVESTASI NTB | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024             |  |
| Media  | Bisnis Indonesia         |  |
| Page   | 6                        |  |
| Author | Harian Noris Saputra     |  |

| PENANAMAN MODAL |

# EBT MAGNET INVESTASI NTB

Proyek siap jalan alias *clean and clear* di sektor energi baru terbarukan atau EBT diharapkan mampu memperkokoh serapan investasi pada tahun ini dari sektor energi dan sumber daya mineral, yang sepanjang tahun lalu mendominasi penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Harian Noris Saputra  
redaksi@bisnis.com

**D**ata Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat bahwa realisasi investasi wilayah ini sepanjang tahun lalu mencapai Rp39,89 triliun.

Dari jumlah itu, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menyerap sekitar Rp23,21 triliun atau memiliki porsi sekitar 58,18%. (Lihat infografik)

Meskipun, serapan tenaga kerja dari sektor ini banyak mencapai 1.092 orang yang terdiri atas 1.059 tenaga kerja Indonesia, dan 36 orang tenaga kerja asing.

Capaian itu masih kalah dari serapan investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, serta ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mendalangi investor ke berbagai sektor penting selain sektor pertambangan.

Hal ini bukan tanpa sebab. Dengan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB mampu menarik investasi nontambang wilayah ini sepanjang 2019–2022.

Pasalnya, banyak investor mulai berinvestasi di sektor pariwisata atau industri yang berkorelasi dengan sektor ini, seperti munculnya banyak hotel dan restoran baru di Pulau Lombok.

Akan tetapi, ketika proyek pengembangan Mandalika mulai surut, setelah beroperasi

sirkuit berskala internasional ini, maka wilayah ini dipandang memerlukan magnet baru untuk menggaet investasi.

Untuk itu, Regional Investment Relation Unit (RIRU) NTB—yang lebih dikenal dengan Tim Promosi Ekonomi Daerah (TPED)—meluncurkan enam proyek investasi *clean and clear*.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) Berry Arisyah Harahap menjelaskan bahwa proyek investasi *clean and clear* yang ditawarkan ke investor, antara lain tiga proyek EBT yang terdiri atas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kabupaten Lombok Tengah, dua proyek *waste incineration* di Kabupaten Lombok Barat, dan tiga pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Kabupaten Lombok Timur.

Selain itu, imbuhnya, ada juga dua proyek di sektor pariwisata, yaitu Hotel Bintang 5 Gili Gede di Kabupaten Lombok Barat dan Hotel Bintang 5 Seven Spring Under Kerakas Beach di Kabupaten Lombok Utara.

Berry mengatakan bahwa di sektor kelautan dan perikanan, ada proyek rumpun laut terintegrasi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dia menjelaskan bahwa setelah ditawarkan melalui berbagai ajang seperti pameran di Bali Beyond and Travel Fair (BBTF) Bali, banyak investor yang menyatakan minatnya.

Menurutnya, ajang tersebut merupakan peluang besar

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi NTB melalui investasi, perdagangan, dan sektor pariwisata sesuai keunggulan yang dimiliki wilayah ini.

Bahkan, imbuhnya, banyak calon investor yang nantinya akan berkunjung ke lokasi-lokasi proyek untuk memastikan kelayakan lokasi berdasarkan dokumen kajian dan studi kelayakan (*feasibility study/FS*) yang telah dipersiapkan.

"Khusus proyek investasi *clean and clear*, Provinsi NTB berhasil menarik banyak calon investor dengan rincian PLTS diminati 12 calon investor, *waste incineration* oleh 10 calon investor, PLTB oleh 10 calon investor, hotel bintang lima Gili Gede oleh 9 calon investor, hotel bintang lima Seven Spring Under Kerakas Beach oleh 7 calon investor, dan rumpun laut terintegrasi oleh 6 calon investor," jelasnya dalam keterangan resminya yang diterima Bisnis, Selasa (18/6).

Sementara itu, Pejabat (Pj.) Gubernur NTB Lulu Gita Ariadi menjelaskan bahwa Pemprov NTB menyambut baik para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin berinvestasi dan mengembangkan produk di wilayah ini.

Apalagi, imbuhnya, produk tersebut dapat menambah pendapatan daerah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) NTB.

"Kami menyambut para investor untuk datang ke NTB.



**Khusus proyek investasi *clean and clear*, Provinsi NTB berhasil menarik banyak calon investor.**

Siap berkomunikasi berbagai soal, seperti ketersediaan lahan supaya apa yang kira-kira menjadi kendalanya segera dirumuskan," jelasnya dalam keterangan resminya.

#### SEKTOR UNGGULAN

Gita sebelumnya juga telah menyatakan bahwa Pemprov NTB membuka lebar pintu investasi pada tahun ini, terutama di sejumlah sektor unggulan seperti pariwisata dan kelautan dan perikanan yang memang menjadi andalan NTB.

Pada awal 2024, Gita mengatakan bahwa penajakan kepada investor terus dilakukan, baik dalam maupun luar negeri. Pemprov NTB juga menawarkan kemudahan perizinan demi mengejar realisasi investasi.

Di sektor pariwisata berkelanjutan, kata Gita, sejumlah

investor sudah berkomitmen untuk berinvestasi di Lombok Timur.

Dia mengatakan bahwa investor itu adalah PT Eco Solutions Lombok (ESL) yang akan membangun *ecoresort* berupa *medical tourism* di kawasan Tanjung Ringgit.

Pembangunan tersebut mengusung konsep berkelanjutan, dengan melestarikan lingkungan alam dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Swedia dan Indonesia juga telah tergabung dalam sebuah kerjasama yang bernama Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SIS).

Di sektor kelautan dan perikanan, Pemprov NTB juga tengah menajaki pengembangan potensi laut NTB dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Gita meminta BRIN membantu pengembangan potensi laut di Lombok Selatan dan Teluk Saleh Sumbawa, seperti pengembangan rumpun laut terintegrasi.

Dia memandang bahwa kehadiran investor sangat penting dalam pembangunan NTB karena potensi wilayah ini besar, tetapi belum bisa tergarap secara optimal.

"NTB merupakan salah daerah destinasi wisata yang banyak dikunjungi, tentu fasilitas dan sarannya harus mendukung dengan menghadirkan para investor. Termasuk di sektor kelautan, mudah para investor ke depannya bisa tertarik untuk datang ke NTB untuk berinvestasi terhadap potensi laut kita," jelasnya kala itu.

Di sektor EBT, Pemprov NTB juga menajaki investasi dengan Korea Selatan. NTB termasuk daerah yang siap dalam pengembangan EBT, terutama untuk mendukung sektor pariwisata berkelanjutan.

Bahkan, dia mengklaim bahwa NTB sudah berhasil menerapkan pariwisata berkelanjutan di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. ☑

Realisasi investasi di Nusa Tenggara Barat mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir sepanjang tahun lalu yang dimotiri oleh capaian di sektor energi dan sumber daya mineral.

Realisasi Investasi NTB (Rp triliun)

| Tahun | Target RPJMD | Target BKPM | Realisasi |
|-------|--------------|-------------|-----------|
| 2019  | 10,02        | 13,3        | 10,02     |
| 2020  | 11,57        | 6,06        | 11,6      |
| 2021  | 13,36        | 12,36       | 13,91     |
| 2022  | 15,42        | 18,5        | 21,6      |
| 2023  | 17,81        | 22          | 39,89     |

Sumber: DPMP-TSP NTB



Sumber: BPS NTB

Realisasi Investasi NTB 2023 per Sektor (Rp miliar)

| Sektor   | Realisasi (Rp miliar) |
|--|-----------------------|
| ESDM   | 23.218,65             |
| Pariwisata & Ekonomi Kreatif                       | 6,12                  |
| Perindustrian                                      | 7.979,03              |
| Perdagangan  | 1.375,55              |
| Transportasi                                       | 373,26                |
| Kesehatan, Obat, & Makanan                         | 62,32                 |
| PUPR   | 169,27                |
| Kelautan & Perikanan                               | 90,54                 |
| Pos, Telekomunikasi, Sistem & Transaksi Elektronik | 127,07                |
| Ketenagakerjaan                                    | 134,19                |
| Peternakan, Pertanian, & Perkebunan                | 239,35                |
| Keuangan   | 1,28                  |
| Pendidikan   | 0,35                  |

Sumber: DPMP-TSP NTB

BISNIS/SINTA, NOVIZAN

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Title  | EFEK BERANTAI EMITEN ROKOK |
| Date   | 19 Juni 2024               |
| Media  | Bisnis Indonesia           |
| Page   | 17                         |
| Author | Wibi P. Pratama            |



| KEBIJAKAN TARIF CUKAI |

# EFEK BERANTAI EMITEN ROKOK

Tidak lama setelah isu kenaikan cukai rokok mengemuka, terdapat pembaruan terhadap target pembaruan dari kalangan analis pasar saham terhadap sejumlah harga saham rokok. Buy or bye?

Wibi P. Pratama  
wibi.pangestu@bisnis.com

**K**ebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) *multiyears* pada 2023—2024 akan segera berakhir, sehingga pembahasan tarif cukai untuk 2025 mulai berjalan. Terdapat sinyal bahwa pemerintah akan kembali menaikkan cukai rokok tahun depan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan bahwa besaran kenaikan CHT akan tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Pemerintah sudah mendapatkan restu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menaikkan cukai—atau dalam bahasa pemerintah, menyesuaikan tarif cukai.

Askolani belum menyebutkan apakah tarif cukai rokok 2025 akan berlaku hanya satu tahun atau *multiyears* seperti sebelumnya. "Tarif CHT *multiyears*" nanti tergantung dengan pembahasan bersama DPR RI," ujar Askolani di DPR, Senin (10/6). Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang diterima *Bisnis*, intensifikasi kebijakan tarif CHT akan dilakukan melalui tarif bersifat *multiyears*, kenaikan tarif yang moderat, penyederhanaan *layer*, dan mendekatkan disparitas tarif antar-*layer*.

Adapun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022, tarif cukai rokok atau CHT pada 2023—2024 naik rata-rata 10%. Sementara itu, untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), tarif cukainya naik maksimal 5% setiap tahun.

Dalam masa pembahasan tarif cukai ini, manajer investasi mulai pasang kuda-kuda dalam menilai prospek saham rokok.

Tercatat, sudah ada manajer investasi yang memperbarui rekomendasinya terhadap emiten rokok. Pembaruan itu sudah terlihat di dua emiten rokok raksasa, yakni PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) dan PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP).

Berdasarkan data *Bloomberg*, terdapat 20 sekuritas yang memberikan rekomendasi atas saham GGRM. Sebanyak 11 sekuritas menyematkan rekomendasi beli (*buy*) untuk saham GGRM. Rekomendasi beli dominan karena rata-rata target harga saham GGRM masih bertahan di Rp18.889 per lembar.

Pada perdagangan Kamis (13/6), saham GGRM ditutup turun 0,54% ke Rp18.275 per lembar. Jika target harga rata-rata itu tercapai, ada potensi keuntungan (*gain*) sebesar 3,35% dari harga penutupan kemarin. Selain itu, 3 sekuritas lainnya merekomendasikan tahan (*hold*) saham GGRM, dan 6 sekuritas merekomendasikan jual (*sell*).

RHB Research memperbarui rekomendasinya terhadap saham GGRM pada Rabu (12/6), saat pembahasan kenaikan kembali cukai rokok pada 2025 mengemuka.

Rekomendasi RHB Research tidak berubah, yakni netral, tetapi target harganya menjadi Rp17.325.

Berdasarkan data *Bloomberg* juga menunjukkan 20 rekomendasi terhadap saham HMSP. Mayoritas sekuritas juga merekomendasikan beli saham Sampoerna tersebut.

Sebanyak 16 sekuritas menyematkan rekomendasi beli untuk saham HMSP. Sebagian besar sekuritas merekomendasikan beli karena rata-rata target harga saham HMSP berada di level Rp1.003 per lembar.

Pada penutupan perdagangan Kamis (13/6), saham HMSP naik 1,45% ke level Rp700 per lembar.

Dengan posisi itu, terdapat

peluang keuntungan hingga 43,2% apabila saham HMSP bergerak ke target harga rata-rata. Hanya satu sekuritas yang merekomendasikan *hold* saham HMSP, dan 3 sekuritas yang merekomendasikan jual.

Salah satu rekomendasi jual muncul karena target harganya di Rp700, seperti harga penutupan Kamis (13/6).

Saham perusahaan rokok PT Wismlak Inti Makmur Tbk. (WIIM) ditutup merah pada perdagangan Kamis (13/6), yakni turun 1,04% ke level Rp950 per lembar.

Data *Bloomberg* menunjukkan terdapat dua sekuritas yang masing-masing melampirkan rekomendasi beli dan tahan saham WIIM. Rata-rata target harga saham WIIM ada di Rp1.200.

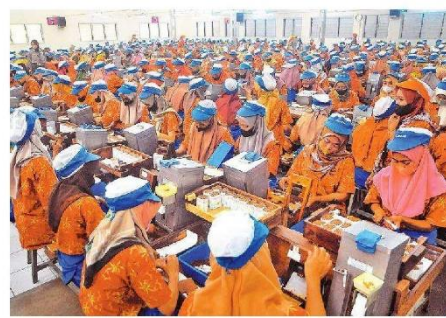
Sekuritas yang merekomendasikan beli mematok target harga Rp2.500, sedangkan Sekuritas yang merekomendasikan tahan mematok target harga Rp1.200.

## KINERJA EMITEN ROKOK

Pada kinerja akhir 2023, pendapatan GGRM menunjukkan penurunan, tetapi masih dapat membukukan laba yang melesat 91,55% sebesar Rp5,22 triliun. Pada kuartal I/2024, laba bersih GGRM turun 69,67% *year-on-year* (YoY) ke angka Rp595,57 miliar, menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Penyusutan laba didorong oleh turunnya pendapatan Gudang Garam pada kuartal tersebut melalui penjualan segmen sigaret kretek mesin (SKM) sebesar 13,61% YoY menjadi Rp23,35 triliun. Pada kuartal I/2024, Sampoerna menjadi satu-satunya emiten rokok yang mampu mencetak pertumbuhan laba.

HMSP membukukan laba bersih yang tumbuh 4,02% YoY menjadi Rp2,24 triliun pada kuartal I/2024, didorong kenaikan penjualan sebesar 7,49% YoY menjadi Rp29,10 triliun.



Pekerja melinting rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di salah satu pabrik di Kudus, Jawa Tengah.

## Tergantung dengan pembahasan bersama DPR RI.

Berbeda dari kontribusi sigaret kretek tangan (SKT) yang belum mampu mengangkat pendapatan GGRM, SKT justru menjadi pendorong terbesar pada total pendapatan HSMSP. Penjualan SKT HSMSP naik menjadi Rp9,10 triliun dari Rp7,27 triliun pada kuartal I/2023, dipengaruhi oleh tarif cukai SKT yang lebih rendah dibandingkan SKM.

Sementara itu, WIIM membukukan penjualan neto yang melambat menjadi Rp1,05 triliun pada kuartal I/2024, dari posisi Rp1,17 triliun pada kuartal I/2023. Meskipun demikian, WIIM mampu mencatat aktivitas ekspor yang naik menjadi R28,89 miliar pada kuartal I/2024, dari posisi

Rp14,47 miliar pada periode yang sama di 2023.

Total nilai ekspor tersebut berkontribusi terhadap total penjualan WIIM pada kuartal I/2024 sebesar 2,73%.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brwajaya (PPKE FEB UB) Joko Budi Santoso, mengatakan kondisi ini akan berdampak pada turnnya volume produksi pabrik perusahaan rokok.


Imbasnya, permintaan pita cukai dari produsen rokok turut menyusut sehingga penernaan CHT pun merosot. Melalui fakta tersebut, perokok dari kalangan menengah ke bawah cenderung akan membeli rokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Hal ini kemudian akan makin membuka lebar ceruk pasar rokok yang menawarkan harga ekonomis kepada masyarakat. Kemunculan pasar rokok tersebut berdampak pada volatilitas perekonomian negara dan berbagai perusahaan rokok sebab pasar ini dimasuki oleh industri rokok ilegal. (Chatarina Nurka/Annisa Rizki Kurniasih) ☒



Petani memanen daun tembakau di Kampung Cikoneg, Cibiru Wetan, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Bisnis Indonesia

|        |                                  |  |
|--------|----------------------------------|--|
| Title  | MEMOLES PESONA KAKAO JAWA TENGAH | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                     |  |
| Media  | Bisnis Indonesia                 |  |
| Page   | 18                               |  |
| Author | M. Faisal Nur Ikhsan             |  |

| KOMODITAS PERKEBUNAN |

# MEMOLES PESONA KAKAO JAWA TENGAH

Komoditas perkebunan kakao Provinsi Jawa Tengah dinilai memiliki peluang besar menyusul melonjaknya harga komoditas itu di pasar global. Namun, komoditas ini dipandang kalah pamor dengan kopi yang dinilai lebih memiliki manfaat bagi para pekebun.

M. Faisal Nur Ikhsan  
redaksi@bisnis.com

Tak dapat dimungkiri bahwa hasil perkebunan kakao di Jawa Tengah masih kalah jauh dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Hal itu kontras dengan lonjakan harga komoditas ini di pasar global lantaran negara utama produsen kakao masih belum bisa memenuhi tingginya kebutuhan industri. Kondisi ini juga terjadi di Jawa Tengah, di mana para produsen cokelat rumahan tengah menghadapi lonjakan harga kakao.

"Kalau biji kakao di Jawa Tengah itu termasuk minoritas. Produksinya itu sangat rendah, hanya di kisaran 2.000 ton biji kakao," kata Sri Mulato dari Coffee & Cocoa Training Center Kota Surakarta, Selasa (18/6).  
Dia menjelaskan bahwa meskipun belum banyak industri cokelat berskala besar di Jawa Tengah, tetapi industri kelas menengah serta usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih sangat membutuhkan pasokan biji kakao tersebut.

Sri memandang bahwa lonjakan harga dan rendahnya pasokan tentunya bakal memengaruhi kapasitas produksi industri menengah dan UMKM tersebut.

Kondisi tersebut sangat disayangkan lantaran produk olahan cokelat tengah banyak diminati oleh konsumen dalam negeri.

Dia mencontohkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, petani-petani kakao di wilayah Gunung Kidul dan Kulonprogo kerap kebanjiran permintaan biji kakao kering dari industri rumahan.

"Karena daerah wisata, industri rumahan untuk produk cokelat itu berjalan pesat di DI Yogyakarta. Kalau industri besarnya *kan* di Indonesia ini hanya ada 20 perusahaan. Sebagian di Sulawesi, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Mungkin efeknya [kenaikan harga kakao] akan lebih terasa di daerah sana," jelas Sri kepada *Bisnis*.

Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah menunjukkan bahwa produksi biji kakao kering pada 2023 berkisar di angka 1.543,03 ton. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan secara tahunan (*year-on-year*/YoY), tetapi belum bisa menyamai level prapandemi Covid-19, atau pada 2019. (Lihat infografik)

Bahkan, pada tahun ini, produksi komoditas perkebunan itu diproyeksikan bakal menyusut tipis di angka 1.501,13 ton. Kabupaten Wonogiri, Batang, dan Kendal dinilai bakal menjadi wilayah sentra produksi kakao di Jawa Tengah.

Sri menyebut bahwa masih ada wilayah lain yang berpotensi untuk dilakukan ekstensifikasi produksi kakao di Jawa Tengah.

"Misalnya, di Purwokerto, terus Purbalingga, Kebumen. Itu sudah ada kakao tetapi masih kurang dirawat. Mereka [petani] baru sadar. Temanggung dan Magelang itu juga ada," jelasnya.

Setidaknya, Sri menyebut bahwa ada beberapa strategi yang bisa dilakukan Jawa Tengah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas kakao a.l rehabilitasi atau pemajaman tanah, hingga ekstensifikasi lahan.



**Walaupun sebenarnya peluang untuk kakao sendiri masih luar biasa. Ada beberapa daerah pengembangan.**

"Sekarang secara sporadis petani melakukan rehabilitasi tanamannya secara swadaya. Idealnya, itu dipasok lembaga yang berwenang," katanya.

#### KURANG DIMINATI

Kendati demikian, petani di Jawa Tengah justru tak banyak yang ikut menikmati manisnya perbaikan harga kakao itu. "Ini masih kurang diminati oleh petani. Saat ini petani beralih ke komoditas kopi yang sedang tren. Itu punya nilai ekonomi yang tidak kalah," jelas Bakti Utama, Sub Koordinator Tanaman Rempah dan Penyegar Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/6).

Bakti menjelaskan bahwa komoditas kakao sejatinya memiliki berbagai manfaat. Dia mencontohkan bahwa untuk industri makanan dan minuman saja, kakao kering menjadi bahan baku utama bagi produk olahan seperti roti, makanan ringan, hingga aneka minuman.

Sayangnya, di Jawa Tengah, pemanfaatan serta pengembangan komoditas itu masih tergolong rendah.

Apalagi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, kakao memang bukan menjadi komoditas perkebunan

an yang mendapat prioritas.

Jawa Tengah, imbuhnya, lebih tertarik untuk mengelola komoditas kopi, kelapa, dan tebu yang dirasa lebih menjanjikan.

"Walaupun sebenarnya peluang untuk kakao sendiri masih luar biasa. Ada beberapa daerah pengembangan seperti di Kabupaten Wonogiri yang pada 2023 bisa produksi sekitar 1.600 ton. Ada lagi di daerah Jepara, Batang, Kendal, dan sekitarnya yang itu memang menjadi daerah sentra produksi kakao di Jawa Tengah," jelas Bakti melalui sambungan telepon.

Menurutnya, usia tanaman kakao menjadi tantangan terbesar bagi peningkatan produktivitas komoditas perkebunan itu. Akan tetapi, imbuhnya, tak banyak yang bisa dilakukan lantaran terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebelumnya, pada 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan sempat mendistribusikan 5.000 batang benih kakao untuk petani di Kabupaten Batang.

Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung upaya pemajaman tanaman dengan harapan mampu mendorong produktivitas kakao di kisaran 3 ton–5 ton per hektare setiap tahunnya.

"Pupuk itu juga suatu keharusan. Selain dibantu benih, petani juga difasilitasi pupuknya supaya target produktivitas ini tercapai. Pupuk organik itu sangat bisa sekali untuk digunakan, itu mesti dimanfaatkan petani supaya bisa memenuhi kebutuhan pertumbuhan tanaman," jelas Bakti.

Di sisi lain, Sri Mulato menjelaskan bahwa petani di Jawa Tengah kebanyakan melakukan pemajaman tanaman kakao secara swadaya.

Petani melakukan pembibitan dengan sistem sambung pucuk demi menjaga produktivitas.

"Yang saya khawatirkan, ketika produksinya meningkat harganya justru turun," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa baik kakao maupun kopi sejatinya sama-sama memiliki nilai ekonomi tersendiri.

Namun, imbuhnya, dua tanaman tersebut memiliki perbedaan masa panen yang perlu menjadi pertimbangan bagi petani.

"Kalau di-*openi* [dirawat], kakao itu 2 tahun–3 tahun sudah mulai panen. Seperti kopi. Kelebihannya, kakao itu bisa berbuah setiap saat. Apalagi ketika sedang masuk musim panen. Kalau kopi *kan* ada jeda panen sekitar 6 bulan," jelasnya. ☐



Kabupaten Wonogiri mendominasi produksi kakao Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2023, disusul Kabupaten Batang dan Kabupaten Wonosobo.


#### Produksi Kakao dari Perkebunan Rakyat Jateng 2023

| Wilayah      | Produksi (ton) | Luas Area (ha) |
|--------------|----------------|----------------|
| Cilacap      | 84,74          | 107,27         |
| Banyumas     | 43,81          | 100,29         |
| Purbalingga  | 0,35           | 5,53           |
| Banjarnegara | 25,27          | 145,69         |
| Kebumen      | 17,95          | 25             |
| Purworejo    | 116,3          | 96,38          |
| Wonosobo     | 175,67         | 195,71         |
| Magelang     | 7,79           | 10,41          |
| Boyolali     | 2,4            | 6,94           |
| Wonogiri     | 485,75         | 1.035,43       |
| Karanganyar  | 11,14          | 43,3           |
| Pati         | 71,31          | 83,25          |
| Kudus        | 1,82           | 6              |
| Jepara       | 64,8           | 355,85         |
| Semarang     | 3,19           | 38,23          |
| Temanggung   | 53,67          | 98,24          |
| Kendal       | 150,73         | 163,5          |
| Batang       | 175,78         | 323,04         |
| Pekalongan   | 36,18          | 64,08          |
| Pemalang     | 9,55           | 30,66          |
| Tegal        | 1,98           | 7,75           |
| Brebes       | 2,81           | 3,9            |



Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMANTAN

|        |                                       |  |
|--------|---------------------------------------|--|
| Title  | Pengusaha Buru Sumber Bahan Baku Baru | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                          |  |
| Media  | Bisnis Indonesia                      |  |
| Page   | 19                                    |  |
| Author | Afiffah R. Nurdifa                    |  |

## | DAMPAK PELEMAHAN RUPIAH |

# Pengusaha Buru Sumber Bahan Baku Baru

Bisnis, JAKARTA — Pelaku usaha makanan dan minuman di dalam negeri mulai memburu sumber bahan baku alternatif untuk menyiasati dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, pihaknya mulai mencari cara untuk menahan ongkos produksi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, sehingga konsumen tidak perlu merasakan kenaikan harga

Untuk diketahui, sekitar 60% bahan baku industri makanan dan minuman nasional masih berasal dari importasi, seperti gandum, gula rafinasi, jagung, hingga bahan baku susu.

“Industri mengantisipasi [pelemahan nilai tukar rupiah] dengan melakukan efisiensi, serta mencari alternatif sumber daya lokal maupun negara lain,” katanya, Selasa (18/6).


Dia menjelaskan, cepat atau lambat harga pokok produksi produk makanan dan minuman bakal meningkat, tetapi pelaku industri masih belum bisa menaikkan harga jual ke konsumen. Dampaknya, pelaku usaha harus mengorbankan laba usahanya.

Pemerintah sendiri berupaya mengimbangi kondisi tersebut dengan mendorong penghiliran produk pertanian. Dengan begitu, bakal tercipta diversifikasi produk pangan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman.

“Pengembangan industri pangan masih memiliki prospek yang besar, sehingga diharapkan ke depannya penghiliran produk pertanian dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita.

Menurutnya, pelaku industri dapat memanfaatkan bahan baku pengganti beras, seperti singkong, sagu, porang, dan sorgum sebagai sumber karbohidrat.

“Percepatan penghiliran komoditas bahan pangan saat ini sangat diperlukan, karena besarnya potensi untuk pengembangan produk olahan lanjutan yang dihasilkan dari bahan baku lokal.” (Afiffah R. Nurdifa)

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | ASDP Distribusikan Ratusan Hewan Kurban | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                            |  |
| Media  | Rakyat Merdeka                          |  |
| Page   | 9                                       |  |
| Author | IMA                                     |  |

Berbagi Di Momen Idul Adha

# ASDP Distribusikan Ratusan Hewan Kurban

DALAM rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 H, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan 20 sapi dan 100 kambing kurban ke-27 cabang operasional dan kawasan Bakauheni Harbour City.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Shelvy Arifin mengatakan, manajemen memaknai momen peringatan Hari Idul Adha untuk bersyukur dan ikhlas berbagi kepada sesama.

Dia berharap, kehadiran ASDP tidak hanya sebagai BUMN penyedia transportasi yang menghadirkan layanan prima melalui angkutan penyeberangan antarpulau, tetapi juga dapat memberikan kemanfaatan yang lebih luas untuk pengguna jasa.

“Terlebih wilayah operasio-

nal ASDP dari Sabang sampai Merauke,” tutur Shelvy dalam keterangan resminya, Selasa (18/6/2024).

Menurut dia, momentum Idul Adha menjadi kegiatan rutinitas tahunan ASDP untuk terus menjalin silaturahmi dan kedekatan dengan warga sekitar wilayah kerja ASDP, melalui penyaluran bantuan hewan kurban.

Selain di kantor cabang, penyaluran bantuan dilakukan di lingkungan Kantor Pusat ASDP di Jakarta Pusat. Sebanyak 12 ekor sapi dan 7 ekor kambing dipotong pada Selasa (18/6/2024). Pemotongan melibatkan para *volunteer* yang berasal dari karyawan ASDP, atau yang disebut dengan *Ferizyan*.

Shelvy merinci, 50 paket daging kurban dibagikan ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), 25 paket ke Koramil (Komando



Shelvy Arifin

Rayon Militer), dan 20 paket ke Polsek (Kepolisian Sektor) Cempaka Putih, dengan berat masing-masing paket kurang lebih 1,5 kilogram (kg) daging.

“Selain itu, bantuan diberikan kepada warga sekitar kantor, petugas OB (*Office Boy*), *security*, petugas parkir, *building*

*management*, dan pedagang warung di sekitar kantor pusat,” jelas Shelvy.

Shelvy menambahkan, pelaksanaan program penyaluran bantuan hewan kurban oleh TJSL ini sejalan dengan fokus Sustainable Development Goals (SDG’s) nomor 1 (Tanpa Kemiskinan), nomor 2 (Tanpa Kelaparan), dan nomor 3 (Kehidupan Sehat dan Berkualitas). Yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menghilangkan kelaparan, dan mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik.

“Meski hanya setahun sekali, namun diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar kantor ASDP dapat mengkonsumsi daging, sebagai tambahan nutrisi jasmani,” ujar Shelvy.

Kemudian, Bakauheni Harbour City (BHC) sebagai salah satu proyek pengembangan kawasan

marina di Lampung Selatan, juga melaksanakan pemotongan hewan kurban di area Siger Park, pada Selasa (18/6/2024).


Total hewan kurban yang dipotong sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing, yang kemudian paket dagingnya dibagikan ke masyarakat sekitar desa Bakauheni.

Hewan kurban di Kawasan BHC ini didapatkan dari peternak lokal di sekitar Lampung Timur dan Selatan. Sehingga ASDP berharap melalui kegiatan kurban dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan peternak lokal.

Hal ini sejalan dengan komitmen ASDP dalam memaknai peran tanggung jawab sosial dan lingkungan berkelanjutan, yang memberikan kemanfaatan besar untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. ■ IMA

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | RI Pilih Abstain Teken Kesepakatan Bersama | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                               |  |
| Media  | Rakyat Merdeka                             |  |
| Page   | 14   |  |
| Author | LDU  |  |

## Kirim Special Envoy Ke KTT Perdamaian Ukraina RI Pilih Abstain Teken Kesepakatan Bersama

INDONESIA memilih abstain alias tidak memberikan suara, saat negara-negara barat sepakat menandatangani komunike di akhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait perdamaian Ukraina (*Ukraine Peace Summit*) di Swiss, Minggu (16/6/2024).

KTT diplomatik dua hari tersebut berlangsung di resor Burgenstock di Stansstad, Swiss. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris hadir bersama para pemimpin dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, serta diplomat dari banyak negara lain.

Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Rolliansyah Soemirat memastikan Indonesia turut berpartisipasi pada pertemuan tersebut.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi tidak hadir langsung pada pertemuan tersebut. Menlu Retno telah menunjuk Dubes RI untuk Swiss, Nguhah

Swajaya, untuk hadir sebagai utusan khusus (*special envoy*) pada pertemuan tersebut.

“Kehadiran special envoy Indonesia mencerminkan komitmen kuat Indonesia terhadap penegakan hukum internasional dan Piagam PBB,” kata pria yang akrab dipanggil Roy tersebut dalam keterangannya, Selasa (18/6/2024).

Roy mengatakan, Indonesia berkeyakinan sengketa harus diselesaikan melalui perundingan dan negosiasi. Pandangan utama yang disampaikan Indonesia adalah bahwa penyelesaian konflik harus melibatkan pihak-pihak dalam konflik.

Roy berujar, Indonesia juga telah menyampaikan bahwa hukum internasional harus ditegakkan. Termasuk hukum kemanusiaan internasional dan Piagam PBB. Indonesia menuntut hukum internasional tidak hanya ditegakkan di Ukraina, tapi juga di Jalur Gaza.

“Indonesia menilai ‘*Joint*

*Communique*’ akan lebih efektif bila disusun secara inklusif dan berimbang,” kata Roy.

Dilansir *Aljazeera*, komunike atau pemberitahuan resmi pasca KTT Perdamaian Ukraina menjabarkan apa yang disebutnya sebagai “visi bersama” tentang “aspek krusial”.

Beberapa poinnya terkait pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina, arus bebas produk pertanian Ukraina ke negara ketiga yang berminat, hingga pertukaran tahanan dan pengembalian semua warga sipil ke Ukraina.

Sebanyak 82 delegasi menandatangani mendukung komunike tersebut. Dalam jumpa pers, Presiden Swiss Viola Amherd mengatakan bahwa sebagian besar peserta menyetujui dokumen tersebut.

Beberapa di antaranya adalah Australia, Austria, Kanada, Chile, Kosta Rika, Pantai Gading, Komisi Eropa, Dewan

Eropa, Parlemen Eropa, Prancis, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Kenya, Kosovo, Latvia, Norwegia, Palau, Qatar, Serbia, Turki, Ukraina, Inggris dan AS.

Indonesia tidak abstain sendirian. India, Meksiko, Arab Saudi, Afrika Selatan, Thailand, dan Uni Emirat Arab juga tidak menandatangani komunike bersama tersebut. Sedangkan Brazil menghadiri pertemuan puncak Ukraina sebagai pengamat, tetapi tidak mendukung komunike tersebut.

Rusia tidak diundang ke pertemuan puncak tersebut. Moskow menganggap pertemuan itu sebagai hal yang sia-sia. Sedangkan China tidak menghadiri acara dua hari tersebut tanpa alasan. Pakistan, yang menganggap China sebagai sekutu terdekatnya, diundang tetapi memilih untuk tidak hadir.


Alasan India tidak menandatangani komunike, karena ketidakhadiran Rusia dalam

pertemuan puncak tersebut. Ia mengatakan India percaya bahwa perdamaian di Ukraina memerlukan penyatuan semua pemangku kepentingan dan keterlibatan yang tulus dan praktis antara kedua pihak yang berkonflik.

Pangeran Faisal bin Farhan al Saud, yang mewakili Arab Saudi, menyampaikan kekhawatiran serupa. “Di sini, penting untuk menekankan bahwa setiap proses yang kredibel akan membutuhkan partisipasi Rusia,” kata Pangeran Faisal.

Sementara itu, Afrika Selatan kecewa dengan kehadiran Israel pada pertemuan Ukraine Peace Summit. Sementara zionis terus melakukan kejahatan perang dan membantai warga sipil di Gaza. Penasihat Keamanan Nasional Afsel Sydney Mufamadi mempertanyakan keabsahan komunike tersebut.

“Sangat mengejutkan bahwa di konferensi ini, Israel hadir dan berpartisipasi,” katanya. ■ LDU

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Jaga Stok saat Pilkada, Bulog Harus Terus Menabung Beras | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024   |  |
| Media  | Investor Daily   |  |
| Page   | 9  |  |
| Author | Tri Listiyarini  |  |

# Jaga Stok saat Pilkada, Bulog Harus Terus Menabung Beras

**JAKARTA, ID**—Pemerintah meminta Perum Bulog menabung beras sebanyak-banyaknya guna menjaga stok menjelang dan saat pemilihan kepala daerah (pilkada) pada November tahun ini. Salah satu strategi peningkatan stok yang bisa dijalankan Bulog adalah membangun kemitraan dengan para petani dan penggilingan padi skala kecil (PPK). Jurus tersebut sekaligus mampu memangkask rantai pasok perberasan nasional yang relatif panjang.

Oleh Tri Listiyarini

**K**epala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, semua pihak dalam rantai pasok perberasan harus bekerja sama. Hal itu penting karena semua pemangku kepentingan di sektor itu harus bisa lebih fokus dalam menghadapi situasi perberasan menjelang dan saat pilkada pada November 2024. "Kami minta kita harus bekerja sama, *hand in hand*. Kita harus bisa lebih fokus menghadapi, khususnya November, itu ada pilkada. Mungkin nanti beras akan jadi pokok pembicaraan yang harus dipersiapkan. Kita tidak ingin beras berpolemik seperti Februari lalu. Beras mesti ada terus, jadi tolong Bulog menabung beras yang banyak," papar Arief.

Apalagi, terdapat kecenderungan kenaikan harga beras di pasar internasional. Hal itu merujuk indeks harga beras dunia Mei 2024 yang dirilis FAO (Food and Agriculture Organization) pada 7 Juni lalu. Laporan FAO itu menyebutkan, indeks harga beras global bulanan pada Mei 2024 mulai naik 1,3% menjadi 137,3 dibandingkan bulan sebelumnya 135,6. Apabila dikomparasi secara tahunan, indeks harga beras global Mei 2024 turut naik 7,5% dibandingkan Mei 2023 yang saat itu 127,8. Sedangkan berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, rerata nasional harga beras medium pada 16 Juni 2024 mencapai Rp 13.410 per kilogram (kg) atau naik dari 11 Juni 2024 yang masih Rp 13.370 per kg.

Dalam menabung beras sebanyak-banyaknya, Bulog bisa membangun kerja sama atau kemitraan dengan para petani dan PPK. Bulog membeli



## Perkembangan Jumlah Penggilingan Padi di Indonesia Berdasar Skala Usaha (Unit)

| Skala Usaha/Kapasitas Giling                                  | Tahun 2012     | Tahun 2020     |
|---|----------------|----------------|
| ● Kecil (Penggilingan Padi Kecil/PPK)                         | 171.496        | 161.401        |
| ● Sedang/Menengah (Penggilingan Padi Sedang/Menengah/PPS/PPM) | 8.628          | 7.332          |
| ● Besar (Penggilingan Padi Besar/PPB)                         | 2.075          | 1.056          |
| <b>Total</b>  | <b>182.199</b> | <b>169.789</b> |

Sumber: BPS, Perpadi

langsung gabah/beras yang dihasilkan para petani dan PPK tersebut. "Yang kecil-kecil ini (PPK) juga bisa kirim (beras) ke Bulog, misalnya yang pecah kulit atau GK (gabah kering giling) di luar kualitas. Itu kalau jual GK kadar air 14% ke Bu-

log (harganya) sudah Rp 7.400 per kg," tandas Arief. Sesuai Peraturan Bapanas (Perbadan) No 04 Tahun 2024, harga pembelian pemerintah (HPP) GK (kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%) di gudang Bulog ditetapkan Rp 7.400

per kg, naik 17,46% dari sebelumnya Rp 6.300 per kg.

### Pangkask Rantai Pasok

Saat menjadi pembicara dalam Rapimnas Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) di Yogyakarta pada 13 Juni 2024, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengutarakan ide perampingan rantai pasok perberasan demi keberpihakan ke petani dan PPK. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membangun kemitraan antara para petani dan PPK dengan Bulog. "Prinsipnya, jangan kecilkan yang besar, tapi besarkan yang kecil. Kalau ada yang sudah besar, jangan diperkecil, biarkan berkembang. Itu yang perlu sama-sama kita lakukan. PPK bisa kirim (beras) ke Bulog," ungkap Arief dalam keterangan yang dikutip Selasa (18/06/2024).

Dengan kemitraan itu, terjadi efisiensi struktur biaya (*cost structure*) perberasan, mengingat saat ini rantai pasok dari produsen ke konsumen relatif panjang. "Urutannya, dari petani ke PPK, kemudian ada penggilingan padi lebih besar, lalu sedikit besar lagi, nanti *cost structure*-nya malah tidak karuan. Itu justru makin tidak efektif," jelas Arief. Karena itu, efisiensi struktur biaya perlu diterapkan agar para petani dan PPK turut memperoleh profit yang kian baik. "Kita itu inginnya malah memotong rantai agar profitya bisa dibagi ke petani dan penggiling padi," kata Arief. Sementara itu, agar kualitas beras di Bulog tetap terjaga, pemerintah telah merilis kebijakan HPP. Ketentuan HPP diberikan kepada Bulog juga sebagai salah satu instrumen dalam menjaga keberlangsungan nasib produsen (petani dan PPK).

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menuturkan,

pihaknya membuka peluang kerja sama lebih luas dengan anggota Perpadi. Bulog ingin merangkul semua pihak, sebab perusahaan itu milik nasional. "Bulog itu milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi, tidak boleh bagi Bulog mendiskriminasi. Karena itu, maksud saya, kita (ibaratnya) perlu bikin akad nikah (dengan Perpadi), saya senang sekali kalau misalnya jadi mitra Perpadi. Tapi sekali lagi, kalau sudah (sepakat) begitu, semua benar-benar oke," tutur Bayu. Bulog sebelumnya menyatakan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di BUMN itu sekitar 1,8 juta ton dengan 30% bersumber dari pengadaan domestik.

### Nasib PPK

Sedangkan Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengungkapkan, melalui Rapimnas Perpadi telah terbuka banyak jalan dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah, utamanya dalam mewujudkan ekosistem perberasan nasional yang semakin baik. "Telah terbuka jalan untuk membangun suatu kolaborasi yang saling mendukung dan menopang. Tetapi juga jangan ada dusta di antara kita, itu prinsipnya," jelas Sutarto.

Saat ini, terdapat 161.401 unit PPK dari 169.789 unit penggilingan padi di Tanah Air. Sutarto pernah menuturkan, kerja sama PPK dengan pemerintah melalui Bulog akan memberikan kepastian pasar sehingga penggilingan padi itu bisa memacu pendapatan dan memodernisasi mesin. Kini, banyak PPK yang mati suri karena sulit mendapatkan bahan baku, apalagi dengan harga gabah yang sempat melonjak tinggi. "PPK siap bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mengisi cadangan beras (CBP), jangan dipikir yang kecil-kecil tidak mampu," kata Sutarto.


|        |                        |   |
|--------|------------------------|---|
| Title  | Panen Padi Beras Merah |  |
| Date   | 19 Juni 2024           |   |
| Media  | Investor Daily         |   |
| Page   | 9                      |   |
| Author | Ant                    |   |



ANT

### **Panen Padi Beras Merah**

Petani menjemur padi beras merah saat masa panen raya di Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali. Selasa (18/6/2024). Tradisi panen padi beras merah yang digelar setiap bulan Juni tersebut menjadi daya tarik pariwisata di kawasan objek wisata yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia itu.

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Perhutani Group Setor Rp 814 Miliar ke APBN | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                                |  |
| Media  | Investor Daily                              |  |
| Page   | 9   |  |
| Author | TI  |  |

## Perhutani Group Setor Rp 814 Miliar ke APBN

**JAKARTA, ID**—Perum Perhutani Group menyetorkan Rp 814 miliar ke APBN pada 2023, baik dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun pajak. Kontribusi tersebut diberikan Perum Perhutani Group kepada negara melalui skema Dana Reboisasi (DR) maupun Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Direktur Utama Perum Perhutani Group Wahyu Kuncoro

mengatakan, Perum Perhutani bersama anak-anak usahanya, termasuk Inhutani I dan Inhutani V, wajib menyetor DR sebesar USD\$ 20 per meter kubik kayu dan PSDH sekitar Rp 20 ribu per meter kubik ke APBN. "Total kontribusi Perhutani Group, baik PNBP maupun pajak, Rp 814 miliar pada 2023 (*audited*). Ini dari kewajiban DR yang kalau didolarkan sekarang yang se-

dang naik sekitar Rp 300 ribu per meter kubik, ini harus disetor ke APBN. Juga kewajiban PSDH yang tarifnya Rp 20 ribu per meter kubik, kalau harga rata-rata kayu dari hutan alam Rp 1,8 juta per meter kubik berarti kontribusinya 18% harus disetorkan kepada pemerintah," ungkap Wahyu saat mengikuti rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Menteri LHK di Jakarta

pada 12 Juni 2024.

Wahyu menuturkan, di tengah kewajiban setoran DR dan PSDH tersebut, situasi bisnis di sektor kehutanan sejatinya sedang tidak baik-baik saja. "Para pelaku bisnis di sektor kehutanan nampaknya perlu mendapatkan perhatian yang lebih terkait situasi yang masih belum membaik ini," tutur dia. Perum Perhutani Group merasakan hal tersebut yang

tercermin dari melemahnya pendapatan perusahaan pada 2023. Berdasarkan Laporan Keuangan (LK) 2023 milik Perum Perhutani Group yang telah diaudit oleh auditor independen Ernst & Young (EY), pendapatan Perum Perhutani Group pada 2023 mencapai Rp 4,7 triliun atau lebih rendah dari 2022 yang sebesar Rp 4,8 triliun. "Kami sudah memperoleh hasil audit LK 2023 dari EY bahwa kondisi

kinerja Perhutani Group dari sisi pendapatannya tidak lebih 1% dari 2022 yang sebesar Rp 4,8 triliun," papar dia.

Turun tipisnya pendapatan Perhutani Group di 2023 itu sejalan dengan melemahnya kinerja ekspor kehutanan khususnya furnitur. "Di 2023 dan 2024 ini, sektor industri kehutanan relatif cukup berat," tandas Wahyu. **(tl)**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Title  | Gejolak Cuaca Ganggu Kalender Tanam |
| Date   | 19 Juni 2024                        |
| Media  | Kompas                              |
| Page   | 8                                   |
| Author | Ahmad Arif                          |



Kementerian Pertanian



Para petani di Klaten, Jawa Tengah, tengah menanam padi, Minggu (16/6/2024). Gejolak cuaca menyebabkan kalender tanam yang biasa mengikuti perhitungan tradisional *pranata mangsa* tak bisa lagi diterapkan. Para petani kini harus berjuang menghadapi ketidakpastian cuaca, tetapi nyaris tanpa pendampingan.

## Gejolak Cuaca Ganggu Kalender Tanam

Kondisi cuaca yang kian tak menentu, seiring perubahan iklim, jadi ancaman terbesar produksi padi di Jawa yang selama ini jadi lumbung padi nasional.

Gejolak cuaca menyebabkan kalender tanam yang biasanya mengikuti perhitungan tradisional *pranata mangsa* tak bisa diterapkan lagi. Para petani di pusat produksi padi di Pulau Jawa saat ini harus berjuang menghadapi ketidakpastian cuaca, tetapi nyaris tanpa pendampingan.

"Saat ini mangsa bodho (musim bodoh). Musim kemarau dan panas, tiba-tiba hari berikutnya hujan. Musim hujan, bisa panas kering. Jadinya petani sering tertipu musim," kata Wardiono (58), Ketua Kelompok Tani Manunggal Roso dari Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah.

Ditemui di sangarnya, bersama belasan petani lain, Jumat (14/6/2024) sore, Wardiono, yang dikenal sebagai penggerak petani alami, menyampaikan kian beratnya beban petani saat ini.

"Petani saat ini semakin terimpit keadaan. Harga jual panen tidak pasti, demikian juga cuaca. Sementara hama semakin banyak dan harga-harga kebutuhan semakin meningkat," katanya.

### Tak bisa diandalkan lagi

*Pranata mangsa* dalam pertanian telah dipraktikkan masyarakat Jawa secara turun-temurun berdasarkan peredaran matahari dan rasi bintang Waluku. Setiap wilayah bisa memiliki kalender berbeda. Untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta, di antara Gunung Merapi dan Gunung Lawu, kalender tanam ini diformalkan pada 1855, saat Pakubuwono VII menjadi Raja Surakarta.

Satuhun menurut penanggalan ini dibagi menjadi empat musim (mangsa) utama, yaitu musim kemarau atau ketiga (88 hari), musim pancaroba menjelang hujan atau labuh (95 hari), musim hujan atau dalam bahasa Jawa disebut

*rendheng* (95 hari), dan pancaroba akhir musim hujan atau *mareng* (86 hari).

Misalnya, dalam bulan pertama atau Kasa (Kartika) atau periode terang 22 Juni-1 Agustus (41 hari), dijelaskan bahwa daun-daun berguguran, kayu mengering, belalang masuk ke tanah. Saatnya membakar jerami dan menanam palawija.

Musim menyebar benih padi, menurut *pranata mangsa* ini, dilakukan pada bulan keenam atau Kanem (Naya), merupakan periode labuh atau hujan, yaitu 10 November-22 Desember (43 hari). Dijelaskan, pada bulan ini buah-buahan (durian, rambutan, dan lain-lain) mulai bermunculan, belibis mulai kelihatan di tempat berair. Saatnya petani menyebar benih padi di pembenihan.

Tuntunan ini berlaku saat penanaman padi sawah hanya sekali dalam setahun, diikuti oleh palawija atau padi gogo, kemudian lahan bera atau tidak ada penanaman.

Menurut Wardiono, perhitungan tradisional ini tak bisa lagi jadi patokan dalam pertanian. Situasi lebih sulit dihadapi para petani yang lahannya tak didukung irigasi dan bergantung pada tadah hujan.

Bahkan, prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menurut Tri Joko (52), petani di lahan tadah hujan dari Temu Wangi, Kecamatan Pedan, Klaten, sudah tak dapat diandalkan. "Lima tahun lalu prediksi BMKG soal kemarau panjang ternyata malah hujan. Petani tambakau di Klaten bangkrut, jagung juga hancur," ucapnya.

"Belakangan, BMKG mulai tepat, tetapi masih sulit juga jadi pegangan karena belum rinci," ujarnya.

Menurut Tri, petani di lahan tadah hujan lebih rentan terhadap gejolak cuaca. "Tanam padi di sawah kalau dua

minggu saja tidak ada hujan bisa kekeringan. Di lahan kering juga gulmanya lebih banyak," katanya.

### Andalkan ilmu "titen"

Wardiono mengatakan, meski *pranata mangsa* tak bisa jadi patokan, beberapa fenomena alam masih bisa jadi penanda. "Ilmu *titen* masih bisa dipakai. Misalnya, kalau gadung (*Dioscorea hispida* Dennst) mulai bertunas, seminggu kemudian akan turun hujan," katanya.

Penanda lain yang kerap menjadi patokan bakal terjadi hujan adalah banyaknya kupu-kupu terbang ke utara, arah Gunung Merapi. Namun, sebagian penanda bagi petani juga sudah menghilang karena praktik pertanian tidak ramah lingkungan dan perubahan lahan, misalnya suara tonggeret (*Cicadidae*) yang bisa menandai akhir musim hujan.

"Mungkin kita perlu kumpulkan tanda-tanda ini untuk menjadi kalender baru, tetapi ini tidak mudah. Kebanyakan petani hanya bisa menebak-nebak," katanya.

### Pergeseran komoditas

Tamrin Khamidi, petani dari Desa Jembayat, Kecamatan Margasari, Tegal, Jateng, mengatakan, cuaca tak menentu menjadi penyebab petani di wilayahnya gagal tanam padi. "Tahun lalu hanya sekitar 50 persen petani di Tegal yang bisa tanam saat MT 2 (musim tanam kedua)," ucap anggota Gerakan Petani Nusantara ini. Semakin sulitnya memprediksi cuaca dan banyaknya serangan hama menyebabkan banyak petani jadi beralih menanam hortikultura. Pergeseran komoditas ini juga dipicu perubahan suhu yang kian panas.

"Cuaca dari tahun ke tahun semakin panas. Sebelum 2010 di Bumijawa (Tegal), keting-

gian 800-an meter masih dingin, tanaman mentimun tidak bisa berbuah. Dulu, di sana suhunya 14-17 derajat celsius, sekarang berkisar 19-20 derajat celsius. Sekarang daerah itu jadi penghasil mentimun dan kacang panjang," kata Tamrin.


Fitriawati (45), petani dari Jembayat, Tegal, juga mengungkapkan, daerah tempatnya bertiap menyerupai Bumijawa. "Tanam padi lebih sering ruginya. Selain biaya mahal, cuaca juga tidak menentu. Akhirnya lebih banyak tanam mentimun dan kacang panjang," katanya.

Sudarmaji (43), petani dari Desa Kedung Bondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengatakan, perubahan cuaca yang semakin tidak menentu terjadi seiring dengan peningkatan hama tanaman, terutama wereng dan pengerek batang. "Belakangan ini hampir sepanjang musim ada hama. Bahkan, tahun lalu saat kemarau panjang juga terjadi ledakan hama wereng di sini," katanya.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Keadulatan Pangan (KKKP) Sa'id Abdullah mengatakan, cuaca yang berubah seiring dengan terjadinya perubahan iklim menjadi ancaman terbesar bagi produksi padi di Jawa yang selama ini menjadi lumbung padi nasional. "Selain produksi tanaman menurun, perubahan iklim juga menurunkan produktivitas petani karena suhu semakin panas dan berbahaya untuk pekerja luar ruangan," katanya.

Tantangan lain adalah konversi lahan dan petani yang semakin menua karena tidak terjadinya regenerasi petani. Anak-anak muda yang terjun ke pertanian rata-rata juga enggan menanam padi. Kalau pun bertiap, mereka lebih memilih hortikultura yang dianggap lebih menguntungkan.

(AHMAD ARIF)

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Harga Gula Masih Tinggi kendati Produksi Berlimpah | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                                       |  |
| Media  | Kompas   |  |
| Page   | 10   |  |
| Author | HEN  |  |

# Harga Gula Masih Tinggi kendati Produksi Berlimpah

Harga rerata nasional gula konsumsi di tingkat eceran Rp 18.220 per kilogram, padahal sejumlah pabrik gula mulai menggiling tebu sejak Mei 2024. Distribusi masih menjadi kendala.

JAKARTA, KOMPAS — Harga rata-rata nasional gula konsumsi di tingkat eceran masih tinggi meskipun produksi gula pada musim giling tebu tahun ini mulai berlimpah. Penyebabnya diperkirakan gula hasil produksi tersebut masih di pedagang dan belum didistribusikan secara merata.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 18 Juni 2024 pukul 14.15 WIB, harga rerata nasional gula konsumsi di tingkat eceran Rp 18.220 per kilogram (kg). Harga itu masih tinggi kendati mulai turun 0,55 persen dibandingkan harga rerata Mei 2024 yang sebesar Rp 18.360 per kg. Namun, secara tahunan, harganya naik 19,9 persen.

Harga gula tertinggi berada di Papua Tengah, yakni Rp 40.000 per kg. Harga tersebut jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) sementara gula konsumsi di tingkat eceran di wilayah Papua, Maluku, dan daerah tertinggal, terdepan, terpendek, dan perbatasan (3TP) Rp 18.500 per kg.

Adapun harga gula terendah berada di Jawa Timur, yaitu Rp 16.660 per kg. Harga gula itu berada di bawah HAP sementara gula konsumsi di tingkat eceran untuk wilayah di luar Papua, Maluku, dan daerah 3TP.

Tenaga ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Yadi Yusriadi, Selasa (18/6/2024), mengatakan, harga rerata nasional gula konsumsi di tingkat eceran memang masih tinggi. Penyebabnya diperkirakan bukan pada produksi, melainkan lebih karena gula hasil produksi Mei-medio Juni 2024 berada di pedagang dan belum didistribusikan secara merata.

"Dari sisi produksi relatif tidak ada masalah karena hampir semua pabrik gula (PG) mulai menggiling tebu sejak Mei 2024. Dalam sebulan, rerata produksi gula nasional berkisar 400.000-450.000 ton. Kalau untuk memenuhi kebutuhan bulanan gula, yakni sebanyak 240.000-250.000 ton, seharusnya mencukupi," ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

## Distribusi agar merata

Yadi juga berpendapat masih tingginya harga rerata nasional gula itu juga bukan lantaran kenaikan harga gula di tingkat petani. Bapanas memang menaikkan harga acuan pembelian (HPP) gula petani dari Rp 12.500 per kg menjadi Rp 14.500 per kg. Namun, seiring dengan mulai masifnya produksi gula nasional, harga gula petani justru turun dan cenderung berada di bawah HPP.

Dalam lelang gula yang sudah dilakukan sejumlah PG, harga

gula petani yang sempat tembus Rp 14.900 per kg, saat ini berada di kisaran Rp 14.200-Rp 14.500 per kg.

"Jadi, penyebab harga gula masih tinggi lebih pada distribusinya yang belum merata. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bisa mendorong agar distribusi gula semakin merata, terutama di wilayah timur Indonesia dan 3TP," kata Yadi.

Ia menambahkan, pemerintah juga bisa melakukan cara lain yang dapat membantu petani sekaligus meringankan beban konsumen. Pemerintah bisa membeli gula petani yang berada di bawah HPP melalui Bulog atau ID Food, kemudian mendistribusikannya ke daerah-daerah yang harga gulanya masih tinggi.

## Cadangan gula

Selain itu, Yadi juga mengingatkan pemerintah agar memiliki cadangan gula yang cukup tahun ini. Cadangan gula itu diperlukan lantaran harga gula berpotensi naik lagi mulai September-Oktober 2024 atau seiring berakhirnya musim giling tebu dan akibat penurunan produksi gula karena imbas El Nino pada tahun lalu.

Kenaikan harga gula itu diperkirakan akan berlanjut pada November 2024 hingga April 2025, karena tidak ada produksi gula dalam periode tersebut.

Produksi gula selanjutnya baru akan berlangsung kembali pada Mei 2025.

"Kalau tidak ada langkah-langkah konkret dari pemerintah, seperti menyerap gula petani atau mengimpor gula, harga gula diperkirakan bisa mencapai Rp 19.000 per kg," kata Yadi.

AGI memperkirakan produksi gula akan turun dari 2,27 juta ton pada 2023 menjadi 2-2,1 juta ton pada 2024. Pada 14 April 2024, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) juga memproyeksikan produksi gula Indonesia bakal turun dari 2,3 juta ton pada 2023 menjadi 2 juta ton pada 2024.

## Produksi ID Food

Di tengah kondisi itu, ID Food, perusahaan induk badan usaha milik negara kluster pangan, tetap optimistis produksi gula anak-anak perusahaan pada tahun ini dapat meningkat 13 persen secara tahunan. ID Food akan berupaya mengoptimalkan produksi enam PG yang dikelola PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, dan PT PG Candi Baru.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto menuturkan, ID Food menargetkan produksi tebu tahun ini sebanyak 3,92 juta ton atau meningkat 10 persen dibandingkan tahun lalu. Rerata produktivitas tebu juga

ditargetkan naik dari 65,7 ton per ha pada 2023 menjadi 70,1 ton per ha pada 2024.

ID Food juga menargetkan rerata rendemen tahun ini bisa meningkat menjadi 7,57 persen dari tahun lalu yang sebesar 7,37 persen. Dengan begitu, target produksi gula sebanyak 296.447 ton atau naik 13 persen dibandingkan tahun lalu diharapkan bisa terealisasi.

"Kami akan mengoptimalkan enam PG yang dikelola tiga anak perusahaan dengan total kapasitas giling sebesar 27.974 ton tebu per hari," katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat yang digelar secara hibrida pada 10 Juni 2024.


Saat berkunjung ke PG Jatitujuh di Majalengka, Jawa Barat, pada 11 Juni 2024, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta PG tersebut mengoptimalkan produksi gula selama musim giling tebu 2024. Ia juga berharap rendemen bisa di atas 7 persen dan gula petani dibeli minimal Rp 14.500 per kg.

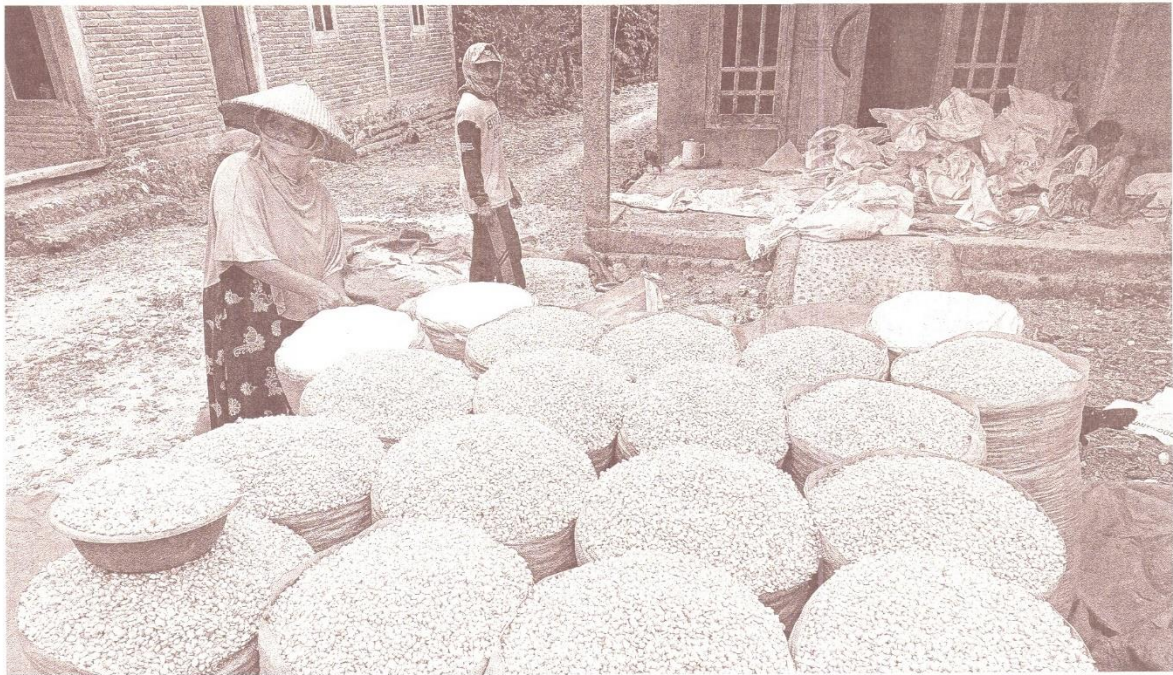
Merujuk pada proyeksi neraca pangan 2024, Arief menyebutkan, pada tahun ini, Indonesia masih akan defisit gula sebanyak 549.000 ton.

Produksi di dalam negeri tahun ini diperkirakan mencapai 2,384 juta ton, sedangkan kebutuhan tahunan gula konsumsi sekitar 2,933 juta ton. (HEN)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMENTAN

|        |                                      |  |
|--------|--------------------------------------|--|
| Title  | Pati Stigma, dan “Bom Waktu” Konflik | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                         |  |
| Media  | Kompas                               |  |
| Page   | 11                                   |  |
| Author | Mohamad Final Daeng                  |  |



Warga kembali beraktivitas meski masih ada rasa takut dan trauma setelah insiden pengeroyokan bos persewaan mobil yang disangka pencuri serta mengakibatkan satu orang tewas dan tiga orang lainnya luka-luka, beberapa hari lalu, di Desa Sumpersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (12/6/2024).

# Pati, Stigma, dan “Bom Waktu” Konflik

Tragedi pengeroyokan di Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, membawa pelajaran berharga. Tindak main hakim sendiri dalam kasus itu sesungguhnya merupakan bagian dari ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

## Mohamad Final Daeng

Bayangan menyeramkan dan rasa waswas menyusul gambaran tentang Sukolilo, Pati, di media sosial pascaperistiwa kelam beberapa waktu lalu sirna saat *Kompas* menyambangi daerah itu pada 12-13 Juni 2024. Kesan masyarakat yang ramah dan baik justru lebih kental terasa selama berinteraksi di sana.

Sukolilo merupakan kecamatan terluas dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wilayahnya mencakup hampir 11 persen dari seluruh luas kabupaten tersebut, setara dengan luas Jakarta Selatan. Adapun jumlah penduduknya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencapai 91.600 jiwa.

Mayoritas warga di Desa Sumpersoko, lokasi peristiwa pengeroyokan, bekerja sebagai petani jagung dengan sampingan beternak kambing dan sapi. Wilayah itu terletak di perbukitan karst yang menjadi bagian Pegunungan Kendeng. Adapun di dataran rendahnya, Sukolilo merupakan kawasan persawahan terbesar di Pati.

Tokoh masyarakat Desa Sukolilo, ibu kota Kecamatan Sukolilo, Darmo Kusumo (64), menceritakan, sejarah Sukolilo terentang jauh sejak sebelum masa Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Wilayah ini merupakan yang paling awal dihuni penduduk di seluruh Pati karena lahannya subur.

Daerah ini juga bagian dari wilayah yang disebut Pati Kidul (selatan) saat Selat Muria masih memisahkan kawasan itu dengan daerah di utaranya, yakni dataran di lereng Gunung Muria. “Nama Pati Kidul merujuk pada wilayah di selatan Selat Muria kala itu,” ujarnya.

Darmo menjelaskan, kata Sukolilo bermakna “suka dan rela berkorban untuk kebaikan”. Masyarakat pun masih memegang teguh nilai-nilai luhur yang melekat pada nama tersebut. Hal itu terwujud dalam kuatnya rasa kebersamaan, gotong royong, dan tolong-menolong antarwarga dalam kehidupan sehari-hari.

Karsidi (60), warga Sumpersoko, menceritakan, jika ada warga yang menggelar hajatan di desa itu, bisa dipastikan seluruh anggota keluarga tetangga akan turut membantu sehingga rumah-rumah di sekitarnya kosong. Begitu pula jika ada warga yang membangun rumah, para tetangga akan mengalihkan aktivitasnya hari itu untuk menolong.

## Stigma

Karena itulah, peristiwa kekerasan yang terjadi di Sumpersoko tersebut banyak disebarkan warga. Hal ini jauh dari nilai-nilai kebajikan yang dipegang masyarakat setempat.

Peristiwa itu bermula ketika BIH (52), pengusaha rental kendaraan asal Jakarta, menyewakan mobilnya ke seseorang, tapi tak kunjung dikembalikan. Dari alat sistem pemosisi global (GPS), mobil itu diketahui ada di Sumpersoko.

Namun, saat BH dan tiga rekannya hendak mengambil mobil itu menggunakan kunci cadangan, mereka diteriaki maling, lalu dikeroyok warga. BH meninggalkan akibat penganiayaan itu dan ketiga rekannya mengalami luka berat.

Video penganiayaan yang memilukan itu pun tersebar luas di jagat maya dan menandai kecamatan dari publik. Peristiwa itu kemudian memunculkan stigma untuk mewakili gambaran Sukolilo, bahkan Pati, secara keseluruhan. Stigma pun meluas menjadi daerah penadahan dan pencuri kendaraan bermotor.

Para pelaku kekerasan itu tentu harus diusut tuntas dan diproses hukum. Namun, pandangan yang memukul rata penilaian terhadap suatu daerah atau masyarakat dari satu peristiwa atau perbuatan sebagian orang saja juga tidaklah tepat.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), AB Widyanta, saat dihubungi, Senin (17/6/2024), mengatakan, stigmatisasi itu adalah bentuk *violence* atau kekerasan juga terhadap pihak yang terstigma. Dia menilai peristiwa yang terjadi di Sukolilo itu dapat pula terjadi di daerah lain.

“Apa yang dilakukan pemilik mobil ataupun warga yang melakukan main hakim sendiri itu sesungguhnya adalah bagian dari *distrust* (ketidakpercayaan) terhadap sistem hukum kita,” ujarnya.

Dalam hal ini, pemilik mobil merasa lebih baik mengambil sendiri mobilnya yang diduga digelapkan itu ketimbang menyerahkan kasusnya ke penegak hukum. Di sisi lain, warga yang terusik rasa keamanannya saat mengira ada tindak pencurian harus menanganinya sendiri ancaman tersebut karena merasa tak bisa mengandalkan aparat hukum.

“Bom waktu” Saat kondisi itu terjadi, psikologi massa mudah meledak dalam amukan yang sulit dikontrol, seperti yang berlaku di Sumpersoko. “Ini bagian dari kemandekan, kemajalan, atau ketumpulan sistem hukum kita yang tak mampu memberikan jaminan keamanan itu,” kata Widyanta.

Ledakan-ledakan seperti itu, ujar Widyanta, juga berpotensi terjadi di daerah-daerah lain, seperti “bom waktu”. Karena itu, dia menyebut peran aparat pelayan masyarakat menjadi kunci untuk mencegahnya dengan melayani warga secara profesional, akuntabel, dan transparan.


“Ini jadi pembelajaran mahal yang tak boleh lagi terulang di masa datang,” ujarnya. Pascakejadian itu, kepolisian bergerak mengusutnya. Hingga Sabtu (15/6), sepuluh orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dengan berbagai peran. Polisi pun masih terus memburu sejumlah orang lain yang diduga terlibat kasus tersebut.

Terkait peredaran kendaraan bodong atau tanpa surat-surat resmi, polisi juga menyita puluhan kendaraan bodong dari sejumlah wilayah di Pati, salah satunya di Sukolilo. Polisi pun meringkus tiga terduga pelaku jual-beli kendaraan yang diduga merupakan hasil kejahatan (*Kompas.id*, 14/6/2024).

Para terduga menjual kendaraan itu, terutama sepeda motor, di semacam “showroom” kecil. Dari pengamatan *Kompas* pada 12-13 Juni 2024, memang mudah menemukan sepeda motor tanpa pelat nomor wira-wiri di kecamatan tersebut, termasuk motor-motor model terbaru.

Darmo Kusumo mengatakan, perdagangan kendaraan bodong di Sukolilo bisa muncul dan berkembang akibat pembiaran. Ulah segelintir orang itu pun membuat nama Sukolilo tercoreng, seperti peribahasa “karena nila setitik, rusak susu sebelanga”.

Dia berharap aparat penegak hukum menjadikan kasus ini momentum untuk menghentikan aktivitas tersebut. Ini dia pandang sebagai kunci mencegah kasus seperti di Sumpersoko terulang, sekaligus memulihkan citra Sukolilo dan Pati secara keseluruhan.

|        |                        |  |
|--------|------------------------|--|
| Title  | Terlalu Panas di Sawah | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024           |  |
| Media  | Kompas                 |  |
| Page   | 8                      |  |
| Author | Ahmad Arif             |  |

# Terlalu Panas di Sawah

Ahmad Arif

Bagi sebagian orang yang sehari-hari beraktivitas di dalam ruangan berpendingin, suhu bumi yang semakin panas mungkin tidak begitu terasa mengganggu. Namun, tanyalah para pekerja yang sehari-hari bekerja di ruang terbuka, seperti petani.

Pemanasan global itu begitu nyata dirasakan petani kita. Sepekan terakhir, kami menemui petani di sentra produksi padi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saat ditanya tentang kondisi suhu dan cuaca, puluhan petani menyebutkan kalimat senada: suhu semakin panas dan cuaca tidak menentu.

Selama ini, perhatian lebih banyak ditujukan terhadap menurunnya produksi tanaman, khususnya padi, akibat perubahan iklim. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produksi padi di Indonesia pada 2023 sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 1,4 persen dibandingkan dengan 2022. Penurunan produksi padi pada 2024 bakal lebih tajam lagi.

Cuaca lebih kering akibat El Nino dituding sebagai penyebab produksi padi kita terendah dalam satu dekade terakhir. El Nino merupakan fenomena iklim regional yang dipicu anomali suhu Samudra Pasifik tropis yang lebih panas daripada biasanya. Pemanasan permukaan air ini meningkatkan pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah barat, termasuk Indonesia.

Fenomena ini telah berulang kali terjadi dan memicu penurunan produksi padi Indonesia. Laporan Siswanto dan tim di jurnal Plos One pada 3 Juni 2023 menunjukkan turunnya produksi padi di Jawa selama periode El Nino. Misalnya, El Nino kuat pada 1997/1998 menurunkan produksi padi tahun 1998 di Indonesia sebesar 3,6 persen dibandingkan dengan panen tahun 1997 dan 6 persen dibandingkan dengan panen tahun 1996.

Banyak studi menunjukkan, produksi pangan bakal merosot seiring dengan pemanasan global. Misalnya, studi Zhao di jurnal PNAS (2017) menunjukkan, setiap kenaikan suhu global 1 derajat celsius akan menurunkan produksi gandum 6 persen, padi 3,2 persen, jagung 7,4 persen, dan kedelai 3,1 persen.

Suhu global pada 2020 lebih panas 1,2 derajat celsius di atas suhu rata-rata pra-Revolusi Industri pada 1850. Kenaikan suhu meningkat menjadi 1,4 derajat celsius pada 2023, menjadikan tahun tersebut sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat.

Terbaru, ilmuwan NASA melaporkan bahwa Mei 2024 merupakan bulan Mei terpanas yang tercatat, menandai satu tahun penuh suhu bulanan mencapai rekor tertinggi. Suhu global saat ini sedikit di atas tingkat 1,5 derajat celsius dibandingkan dengan rata-rata akhir abad ke-19.

## Paparan panas

Selain dampak pemanasan terhadap produktivitas pertanian, paparan panas ekstrem juga berdampak langsung pada tenaga kerja di sektor ini. Para petani padi, yang rata-rata berumur paruh baya, bahkan lanjut usia—karena gagalnya regenerasi petani muda—telah meresponsnya dengan mengubah jam bekerja, dengan datang ke sawah lebih pagi dan kembali sore. Mereka juga harus beristirahat lebih banyak, selain minum air putih lebih banyak.

Beberapa petani, terutama para buruh tani, mengaku menjadi semakin sering berendam di

saluran air, bahkan ada yang memasukkan es batu ke dalam baju karena tak tahan dengan panas yang memanggang. Sejumlah petani di Klaten dan Indramayu juga menginformasikan rekan mereka yang meninggal mendadak saat bekerja di bawah terik matahari.

Di Bojonegoro, petani melaporkan adanya kasus kanker kulit. Sekalipun meninggalnya petani saat bekerja ini tak bisa dikonfirmasi penyebab utamanya, hal ini seharusnya menjadi sinyal perlunya perhatian lebih terhadap keamanan petani.

Banyak studi menunjukkan, paparan panas memiliki efek langsung pada tubuh, seperti dehidrasi, *heat stroke*, ancaman kanker kulit non-melanoma, hingga masalah kesehatan mental. Penelitian Nicholas H Wolff dan tim di jurnal Lancet Planetary Health (2021) menunjukkan, kenaikan suhu di Berau, Kalimantan Timur, hingga 0,95 derajat celsius dalam kurun waktu 2022 hingga 2018 telah meningkatkan kematian populasi.

Menurut kajian ini, peningkatan suhu harian di Berau telah meningkatkan 7,3–8,5 persen kematian dari semua penyebab atau berkisar 101–118 tambahan kematian per tahun pada 2018. Selain itu, peningkatan suhu ini juga menyebabkan peningkatan waktu kerja yang tidak aman sebesar 0,31 jam per hari di daerah yang terdeforestasi dibandingkan dengan 0,03 jam per hari di daerah yang mempertahankan tutupan hutan.

Paparan panas jelas mengancam produktivitas kerja petani. Laporan di jurnal Global Change Biology pada 19 Januari 2024 menyebutkan, kapasitas fisik petani untuk bekerja di luar ruangan dinilai akan terus menurun seiring dengan kenaikan suhu. Menurut laporan ini, separuh dari petani di lahan pertanian di dunia bekerja di bawah kapasitas 86 persen dalam kondisi iklim "baru-baru ini" atau dalam periode 1991–2010.


Para peneliti memproyeksikan, pada akhir abad ini, produktivitas tenaga kerja di wilayah penghasil tanaman pangan di Asia Tenggara hingga Amerika Selatan diperkirakan mengalami penurunan hingga 70 persen.

Dari cerita para petani padi di Jawa, kenaikan suhu tak hanya mengganggu produktivitas kerja pada siang hari. Kenaikan suhu juga terjadi pada malam hari sehingga mengganggu waktu beristirahat. Hampir semua petani yang ditemui mengaku tidak bisa memasang pendingin ruangan.

Dengan semakin tertekannya kehidupan petani dan produksi pertanian, regenerasi petani pun bakal makin sulit terjadi. Siapa lagi yang mau bekerja di sawah yang semakin panas dan cuaca yang kian ekstrem?

Perubahan iklim menyebabkan lebih banyak masalah selain cuaca panas. Udara panas menguapkan lebih banyak air sehingga tanaman, hutan, dan bentang alam jadi kering dan lebih rentan terhadap kebakaran hutan. Pengurangan air yang tinggi juga meningkatkan ancaman badai dan hujan ekstrem. Pemanasan juga membuat air laut mengembang sehingga dapat membanjiri wilayah pesisir.

Semua fakta ini menunjukkan perubahan iklim telah mengancam masa depan kehidupan. Segala daya seharusnya dilakukan untuk mengerem kenaikan emisi yang menjadi pemicu pemanasan global ini, selain memperkuat adaptasi, termasuk di kalangan petani yang menjadi penopang pangan kita.

|        |                              |  |
|--------|------------------------------|--|
| Title  | Inflasi Pangan di Depan Mata | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                 |  |
| Media  | Koran Kontan                 |  |
| Page   | 14                           |  |
| Author | Arif Ferdianto               |  |

# Inflasi Pangan di Depan Mata

Sejumlah harga komoditas pangan kembali merangkak naik

Arif Ferdianto

JAKARTA. Ancaman inflasi pangan sudah di depan mata. Setelah Hari Raya Idul Adha 1445 H, sejumlah harga kebutuhan pokok kembali merangkak naik. Mengacu panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (18/6), harga beras premium memang masih turun 0,13% menjadi Rp 15.430 per kilogram (kg) dibandingkan sepekan sebelumnya. Namun harga beras medium naik 0,07% menjadi Rp 13.390 per kg.

Begitu pula dengan harga bahan pangan sumber protein. Misalnya harga daging sapi murni naik 0,09% menjadi Rp 134.190 per kg. Kemudian harga daging ayam ras melonjak 1,16% menjadi Rp 37.650 per kg, termasuk juga harga telur ayam ras menanjak 6,01% menjadi Rp 31.420 per kg.

Selanjutnya, harga cabai merah keriting meningkat 3,77% menjadi Rp 58.870 per kg. Kemudian harga cabai rawit merah meroket 12,12% menjadi Rp 50.890 per kg.

Adapun harga minyak goreng curah naik 0,38% menjadi Rp 15.810 per liter. Selain itu, harga gula konsumsi mengalami kenaikan 2,07% menjadi Rp 18.730 per kg dibandingkan seminggu terakhir.

Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional, Ki Musbar Mesdi mengemukakan, pada hari besar keagamaan, kenaikan harga telur kerap

terjadi. Biasanya di momen tersebut para pedagang sedikit mengambil keuntungan. "Para pedagang telur UMKM sedikit mengambil *margin profit*," ungkap dia kepada KONTAN, Selasa (18/6).

Meski begitu, Musbar menyatakan dalam beberapa hari terakhir ini pasokan telur di pasaran mulai terkendali. Harga telur di level peternak pun masih berada di level Rp 24.000 - Rp 26.000 per kg. Dus, dalam beberapa hari ke depan harga telur diperkirakan masih bisa stabil.

## Produksi dan distribusi

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), Khudori mengatakan harga sejumlah bahan pangan memang sudah naik sebelum hari raya kurban. Seperti daging ayam, bawang, cabai serta telur. "Beberapa

hari ini masih naik," ucap dia kepada KONTAN, Selasa (18/6).

Kenaikan harga cabai dan bawang merah, menurut Khudori, merupakan efek dari hasil produksi yang terbatas sebagai imbas musim kemarau sejak tahun lalu. Adapun harga daging ayam yang masih relatif tinggi lantaran harga anak-anak ayam dan pakan masih tinggi.

Sedangkan untuk beras, Khudori memproyeksikan harganya berpeluang kembali merangkak naik. Ini imbas dari estimasi penurunan produksi beras pada Juli-Agustus nanti. "Beras berpeluang menyumbang inflasi setelah sebelumnya deflasi," tutur dia.

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Eliza Mardian nilai, jika pemerintah tidak segera membenahi pasokan dan distribusi komoditas pangan, maka inflasi pangan bakal mengancam ke depannya. Per April kemarin, inflasi pangan tercatat 9,63% secara tahunan.

"Tingginya inflasi pangan akan semakin menggerus daya beli masyarakat, terlebih 60% dari total pengeluaran masyarakat menengah bawah untuk pangan," tegas dia.


Untuk mengendalikan harga pangan, menurut Eliza, pemerintah harus mampu memperlancar pasokan dan distribusinya. Bukan menerapkan harga eceran tertinggi. "Kelancaran distribusi menentukan harga," ungkap dia.

## Harga Pangan (Rp per kg)

| Komoditas            | 31 Des 23 | 18 Juni 24 | Perubahan |
|----------------------|-----------|------------|-----------|
| Beras medium         | 13.910    | 13.270     | -4,60%    |
| Beras premium        | 14.990    | 15.410     | 2,80%     |
| Gula pasir           | 17.310    | 18.220     | 5,26%     |
| Minyak goreng curah* | 14.680    | 15.870     | 8,11%     |
| Daging ayam ras      | 35.760    | 37.750     | 5,56%     |
| Telur ayam ras       | 28.160    | 29.960     | 6,39%     |
| Cabai merah keriting | 54.990    | 60.230     | 9,53%     |
| Bawang merah         | 36.770    | 42.220     | 14,82%    |
| Bawang putih         | 37.950    | 41.900     | 10,41%    |

\*Rp per liter;

Sumber: Badan Pangan Nasional

|        |                                  |   |
|--------|----------------------------------|---|
| Title  | Panen Beras Merah                |  |
| Date   | 19 Juni 2024                     |   |
| Media  | Koran Kontan                     |   |
| Page   | 11                               |   |
| Author | Antara Foto/Nyomon Hendra Wibowo |   |

## Panen Beras Merah



ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

**Petani** menjemur padi beras merah saat masa panen raya di Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali. Selasa (18/6). Tradisi panen padi beras merah yang digelar setiap bulan Juni tersebut menjadi daya tarik pariwisata di kawasan objek wisata yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia itu.


|        |                          |  |
|--------|--------------------------|--|
| Title  | Penopang Ekonomi         | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024             |  |
| Media  | Koran Kontan             |  |
| Page   | 2                        |  |
| Author | Antara/Cheppy A. Muchlis |  |

## Penopang Ekonomi

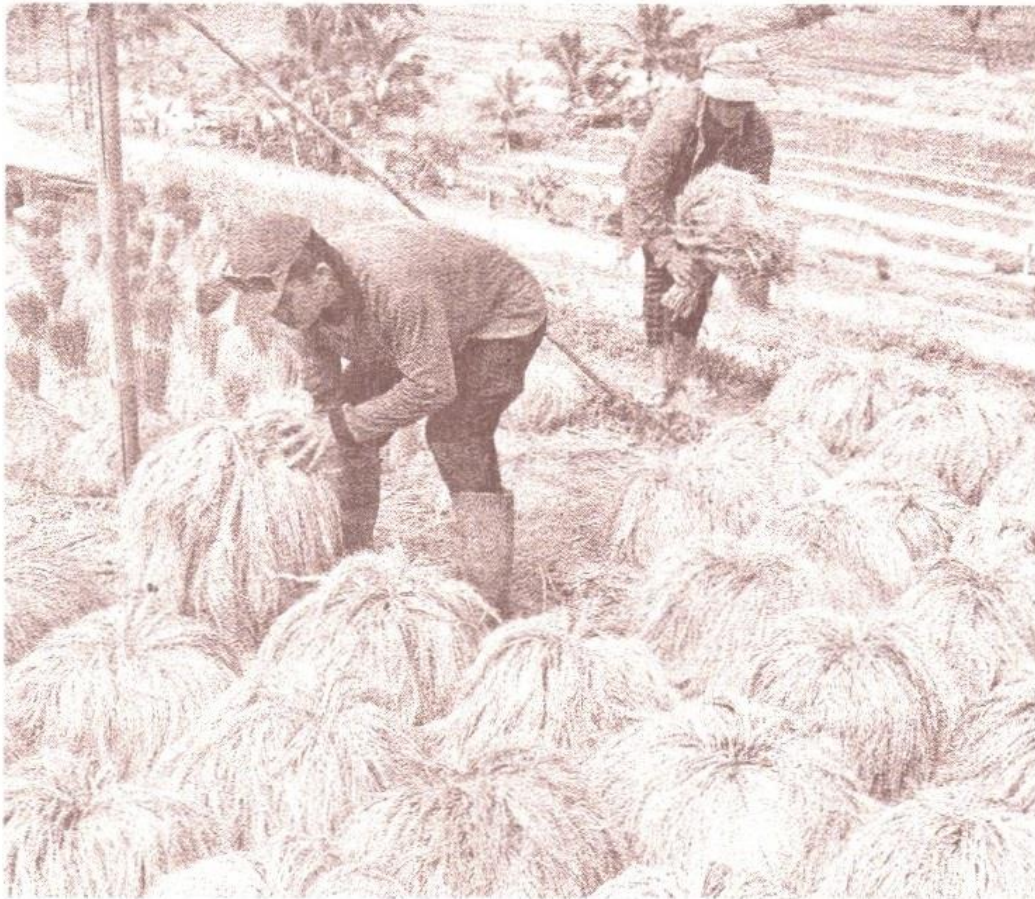


KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Masyarakat berbelanja bahan pokok sayur mayur di pasar tradisional Jakarta, Rabu (18/6). PricewaterhouseCoopers Indonesia (PwC) Indonesia memperkirakan konsumsi rumah tangga akan tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% pada tahun 2024.


|        |                             |  |
|--------|-----------------------------|--|
| Title  | Seasonal speetaele          | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                |  |
| Media  | The Jakarta Post            |  |
| Page   | 4                           |  |
| Author | Antara/Nyoman Hendra Wibowo |  |

## Seasonal spectacle



Antara/Nyoman Hendra Wibowo

Farmers dry red rice during the harvest at Jatiluwih village in Tabanan, Bali, on Tuesday. Local farmers pick June as the best time to harvest the rice as the activity can attract tourists to their village during the peak holiday season.

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | AIA Mulai Sosialisasi Amran Sulaiman Panggil Adnan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                                       |  |
| Media  | Tribun Timur                                       |  |
| Page   | 1 Part 1   |  |
| Author | Erl  |  |

# AIA Mulai Sosialisasi, Amran Sulaiman Panggil Adnan


**MAKASSAR, TRIBUN** - Partai Gerindra Sulawesi Selatan mulai mensosialisasikan ketuanya, Andi Iwan Aras (AIA) sebagai bakal calon Gubernur Sulsel. Sosialisasi



si dilakukan dalam bentuk baliho yang dipasang di 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Ribuan baliho

■ **ke halaman 7**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | AIA Mulai Sosialisasi Amran Sulaiman Panggil Adnan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                                       |  |
| Media  | Tribun Timur                                       |  |
| Page   | 1 Part 2   |  |
| Author | Erl  |  |

## AIA Mulai Sosialisasi, Amran Sulaiman Panggil Adnan

Sambungan Hal.1

dan spanduk tersebut bergambar wajah AIA dengan tagline Sulsel Melenting. Tak hanya itu, Gerindra juga membranding 100 mobil bergambar AIA.

Di Kota Makassar, beberapa ruas jalan terlihat spanduk jumbo milik AIA.

Pantauan Tribun Timur, mulai dari Kecamatan Manggala di Jl Toddopuli Raya, Jl Puri Taman Sari, Jl Barua Raya terpasang spanduk AIA.

Lalu terlihat juga di Kecamatan Ujung Pandang Jl Bontolempangan, Jl Pisang Utara dan Jl Pattiro Somppe.

Ada juga di Kecamatan Panakkukang yang dipasang di dekat Kantor Kelurahan Tello Baru, Jl Urip Sumoharjo dan Pampang.

Kemudian di Kecamatan Wajo terlihat di Jl Sulawesi dan Jl Tentara Pelajar.

Untuk wilayah Kecamatan Rappocini terlihat sepanjang Jl Hertasning, Jl Pettarani dan di daerah Balla Parang.

Ketua Bappilu Gerindra Sulsel, Harmansyah mengatakan, pemasangan spanduk dan balho di Makassar sudah dilakukan sejak dua hari terakhir.

"Makassar sudah bergerak selama dua malam kita pasang. Ada sekitar 300 lebih untuk wilayah Makassar yang kita pasang," tambah dia.

Pemasangannya, kata Harmansyah, di tempat strategis di Kota Makassar yang banyak dilihat oleh orang-orang.

"Semua di daerah poros dan sudut-sudut Makassar kami pasang," ujarnya.

"Mobil branding juga sudah kita slapkan untuk ketua kami," jelasnya.

### Temui Danny

Di momen Idul Adha 1445 H, AIA memanfaatkannya bertemu Wali Kota Makassar yang juga bakal calon Gubernur Sulsel, Danny Pomanto di kediaman AIA Jl Toddopuli, Makassar.

Dalam foto yang beredar di grup-grup WhatsApp, Danny Pomanto dan Andi Iwan tampak duduk semeja sembari ngobrol bareng.

Lokasi pertemuan tampak dalam sebuah ruangan tamu. Terkait pertemuan empat mata itu diakui oleh



Danny Pomanto.

Wali Kota Makassar ini mengaku pertemuan itu berlangsung selama dua jam.

Selain datang bersilaturahmi di momen lebaran, Danny dan Andi Iwan rupanya membahas soal Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel.

"Kita saling diskusi, dua jam pertemuan. Namanya bicara politik, bukan hanya soal pilkada," kata Danny Pomanto saat dikonfirmasi, Selasa (18/6/2024).

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini merasa bangga terhadap kader Gerindra.

Apalagi Gerindra baru saja mengantarkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih periode 2024-2029.

Tak hanya itu, Danny Pomanto juga kagum terhadap sosok Andi Iwan Darmawan Aras.

Selain terpilih anggota DPR RI tiga periode, Andi Iwan juga berhasil menaikkan jumlah kursi Gerindra di Dapil Sulsel.

Di tingkat DPR RI, Gerindra meraih 4 kursi, sementara DPRD Sulsel mengunci 14 kursi legislatif.

"Saya selalu bilang bahwa kami selalu hormat pada semua partai apalagi Gerindra partai pemenang eksekutif," katanya.

Terkait koalisi partai di Pilgub Sulsel, Danny menyampaikan pertama-tama ia memperkuat hubungan silaturahmi dengan partai politik maupun figur lainnya.

"Kalau saya itu kan hal yang lain tapi hal pertama

jalin komunikasi dengan baik dengan penuh respect dan hormat *sipakatau sipakalebbi*, itu yang paling penting," tandasnya.

### Amran Bertemu Adnan

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga memanfaatkan momen Lebaran Idul Adha ini untuk melakukan lobi-lobi politik.

Amran bertemu dengan Bupati Gowa Adnan Purichtha Ichsan YL di AAS Building, Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Senin (17/6).

Adnan tiba di kantor kakak kandung Andi Sudirman Sulaiman itu usai menunaikan ibadah Salat Idul Adha.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu membahas terkait Pilgub Sulsel 2024.

Hal itu dibenarkan orang kepercayaan Adnan, Ian Latanro saat dikonfirmasi, Selasa (18/6).

"Pertemuan itu berlangsung sekitar 30 menit," kata Ian Latanro.

"Pada prinsipnya Pak Adnan datang untuk bersilaturahmi dan menyampaikan kenapa selama ini belum sempat datang karena memang waktunya belum dirasa pas," tambahnya.

Dalam pertemuan itu, Ian menjelaskan bahwa di hadapan Amran Sulaiman, Adnan menyampaikan soal peluangnya maju Pilgub Sulsel.

Terkait keseriusan maju bertarung, Adnan mengaku masih menunggu restu dari DPP Golkar dan Istana.

Adnan berharap restu dari Istana akan memuluskan langkahnya dalam mengi-

kuti Pilgub Sulsel 2024.

Dengan dukungan penuh dari para pemimpin dan tokoh berpengaruh di Provinsi Sulsel.

"Beliau sangat patuh dan tertib terhadap arahan istana. Artinya, hal ini sudah diklarifikasi dalam pertemuan dengan Pak Amran," jelasnya.

Lebih lanjut, Ian Latanro membeberkan bahwa Adnan kerap kali diundang untuk bertemu.

Namun baru kali ini menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dengan orang nomor 1 di Kementerian Pertanian (Kementan) itu.

Dia juga memastikan tidak ada tawaran dari Amran untuk Adnan dalam pertemuan tersebut.

"Tidak ada tawaran, pembicaraan tidak sampai ke situ. Sebetulnya pertemuan ini lebih ke meng-clear-kan situasi," katanya.


Artinya begini, lanjut dia, kenapa Adnan selalu diundang untuk ketemu selalu kayak menghindari.

"Jadi bertemu jangan sampai nanti dianggap sombong," tambahnya.

Anggota DPRD Sulsel ini pun memastikan Adnan Purichtha Ichsan sangat membuka peluang untuk berpaket dengan siapa saja di Pilgub Sulsel.

Bahkan Adnan membuka peluang untuk jadi calon wakil atau O2 di Pilgub.

"Pak Adnan itukan tetap dengan timeline yang ada sekarang dan mulai jalan, apa semua segala macam sambil menunggu restu. Siapa O1 siapa O2 belum ada yang fix," katanya. (erl)

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Title  | Antisipasi Gelombang Panas Pengaruhi Pangan |  |
| Date   | 19 Juni 2024                                |   |
| Media  | Fajar Makasar                               |   |
| Page   | 9 Part 1                                    |   |
| Author | Wid/Yuk                                     |   |

# Antisipasi Gelombang Panas Pengaruhi Pangan

**MAKASSAR, FAJAR** — Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman (AAS) menegaskan, dirinya fokus mengurus sektor pertanian. Terkhusus lagi dalam hal penguatan sektor pangan.


Kata dia, itu merupakan tugas

utama yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Amran diminta untuk sigap dalam mengantisipasi gelombang panas tinggi yang bisa berpengaruh pada urusan pangan.

Termasuk juga mengecek seluruh sungai di Indonesia

untuk pemasangan pompa. Ini guna memenuhi kebutuhan pasokan air bagi lahan persawahan tadah hujan yang kering akibat gelombang panas ekstrem beberapa waktu lalu.

🔗 [Baca Antisipasi... Hlm 11](#)

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Antisipasi Gelombang Panas Pengaruhi Pangan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                                |  |
| Media  | Fajar Makasar                               |  |
| Page   | 9 Part 2                                    |  |
| Author | Wid/Yuk                                     |  |

# Antisipasi Gelombang Panas Pengaruhi Pangan

➤ Lanjutan **Halaman... 9**

AAS mengaku, pihaknya terus berupaya mengencangkan program Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui pompanisasi yang terpasang di sejumlah sungai, baik sungai besar maupun kecil. Menurutnya, itu solusi cepat dalam mengantisipasi kekeringan panjang yang telah menurunkan produksi dalam negeri.

"Saat ini seluruh jajaran Kementan bergerak di lapangan, memastikan solusi cepat pompanisasi terpasang secara baik. Terutama di daerah-daerah sentra yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Sulsel," ujar-

nya, Senin, 17 Juni.

Hal ini memang sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi agar perencanaan dalam menghadapi gelombang panas tinggi dikalkulasi dan diantisipasi dari sekarang. Hal ini guna menghindari kekeringan yang akan berpengaruh terhadap produksi pangan nasional.

"Diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air. Tidak ada air dan akan masuk pada kekurangan pangan. Jangan main-main dengan urusan kekeringan dan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi," kata Jokowi, beberapa waktu lalu.

Di Sulsel sendiri, Amran sudah menyerah-

kan sejumlah bantuan di sektor pertanian kepada masyarakat yang terkena dampak banjir bandang di tujuh kabupaten. Itu dilakukan demi mengembalikan fungsi lahan pertanian sebagai sumber pangan.

"Kami memberikan bantuan dari Kementan berupa alat pertanian, pupuk dan bibit. Ini perlu untuk diperhatikan, karena lahan pertanian merupakan sumber dari produktivitas pangan kita," ujarnya.


Amran juga menegaskan, pihaknya fokus untuk membuka lahan produktif seluas lima juta hektare. "Kalau ini tetwujud, kita bukan cuma swasembada pangan, tetapi juga bisa menjadi

sentra suplai ke beberapa negara sahabat," tuturnya.

Pengamat Ekonomi UMI, Syamsuri Rahim menilai, untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas tetap stabil, diperlukan intensifikasi dengan memaksimalkan lahan yang sudah ada.

Menurutnya, sistem pompanisasi cukup efektif mendorong naiknya produktivitas pangan.

"Pasokan air memang sangat penting, karena tanaman bergantung dengan air. Kondisi sekarang tidak semua lahan pertanian tersentuh irigasi. Makanya pompanisasi itu juga bisa menjadi solusi," jelasnya. **(wid/yuk)**

|        |                                  |  |
|--------|----------------------------------|--|
| Title  | Batanghari Salurkan 100 Alsintan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                     |  |
| Media  | Jambi Ekspres                    |  |
| Page   | 5                                |  |
| Author | Rra                              |  |

## Batanghari Salurkan 100 Alsintan

**BATANGHARI** - Pemerintah Kabupaten Batanghari, menyalurkan alat mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani dalam rangka percepatan musim tanam untuk mendorong peningkatan produksi pertanian.

Bantuan alsintan sebanyak 100 unit ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah daerah.

Bupati Kabupaten Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengatakan, dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi serta mendukung ketersediaan pangan daerah maka sumber produksi tanaman pertanian, perikanan dan perkebunan khususnya di pedesaan perlu menjadi perhatian.



FOTO: ALZULFIYAH/KEPABERSIHAN

**SALURKAN ALSINTAN:** Pemkab Batanghari menggelar acara penyaluran Alsintan kepada kelompok tani.

Ini penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan se-

hingga akan berpengaruh terhadap capaian peningkatan nilai tukar petani. "Kita

berkomitmen ke depannya menjadikan pembangunan sektor pertanian sebagai

salah satu prioritas pembangunan," katanya. Ia mengatakan mayoritas

masyarakat di Kabupaten Batanghari bermata pencaharian sebagai petani, maka dari itu sektor pertanian dijadikan paling utama dari 36 program unggulan. Pada 2024 pemkab juga mendapatkan alokasi 1.500 Hektar Optimalisasi Lahan (Opla) dari Pusat. "Untuk optimalisasi pertanian kita mendapat alokasi sebanyak 1.500 hektar Opla, nanti kawan - kawan kelompok tani di data sawah sawah yang sudah lama tidak digarap," ujarnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari (PPP) Fahrizal menyampaikan program ini merupakan kegiatan lanjutan selama masa kepemimpinan Bupati Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Bupati H Bakhliar.

"Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pengamanan ketahanan pangan dalam

wilayah Kabupaten Batanghari, dan juga merupakan pengembangan visi - misi Bupati dan Wakil Bupati Batanghari," ujarnya.

Dengan adanya alsintan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing pertanian, dan memudahkan petani dalam mengembangkan lahan pertaniannya. Pada kesempatan itu juga, Pemerintah Kabupaten Batanghari juga memberikan penghargaan kepada pemenang lomba penyuluh dan kelembagaan petani tahun 2024.

Alsintan yang disalurkan kepada para petani di antaranya, Pompa Air Honda sebanyak 10 unit, Pompa Air Ishoku sebanyak 15 unit, Pompa Air MB-P100 sebanyak 10 unit, Pompa Air Guntur GTO sebanyak 2 unit, traktor roda 2 quick amberjack sebanyak 35 unit dan traktor roda 2 rotari sebanyak 20 unit. (rza)

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Bupati Lamongan Tinjau Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Qurban di Masjid AlAzhar | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024  |  |
| Media  | Pojok Kiri  |  |
| Page   | 4   |  |
| Author | Pojok Kiri  |  |

## Bupati Lamongan Tinjau Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Qurban di Masjid Al-Azhar

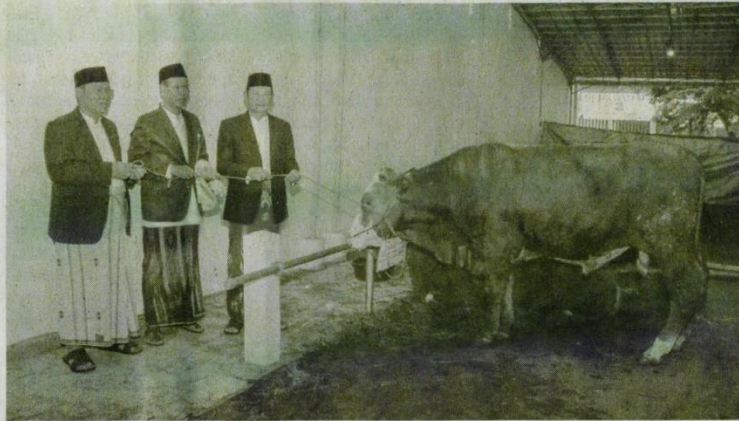
### Lamongan, Pojok Kiri

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi tinjau penyembelihan hewan kurban 1445 Hijriah, Senin (17/6) di Masjid Muhammadiyah Al Azhar.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penyembelihan hewan kurban memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah kami bisa merayakan Idul Adha 1445 dengan hikmat. Hari ini berkesempatan meninjau penyembelihan hewan kurban di salah satu penyembelihan hewan Lamongan. Kita pastikan penyembelihannya aman dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Selanjutnya Pak Yes menjelaskan bahwa pemotongan hewan kurban harus dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH). Yangmana sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/



Bupati Lamongan melihat hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Al-Azhar Lamongan. (Zainul Lutfi/Pojok Kiri)

Permentan/PD.410/9/2014 Tahun 2014.

Adapun pemotongan hewan kurban yang boleh dilakukan di tempat pemotongan di luar RPH. Namun harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi meliputi surat izin dari pemerintah daerah kabupaten/

kota, yakni Bupati/Walikota setempat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner.

Sedangkan persyaratan teknis harus terhindar dari lokasi yang rawan banjir, tidak mengganggu ketertiban umum, memiliki fasilitas

pemotongan hewan kurban, memiliki lahan dengan luas yang memadai sesuai jumlah hewan yang akan dipotong, mempunyai akses air bersih yang cukup untuk kegiatan pemotongan hewan, kegiatan pembersihan dan desinfeksi, dan lainnya.

"Pasti beberapa bulan sebelum pelaksanaan Idul


Adha, Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Dinas Kesehatan dan Peternakan Hewan Kabupaten Lamongan sudah melakukan pemeriksaan penuh mulai dari populasi hewan kurban, kesehatan, hingga pemotongan hewan. Pagi ini di Masjid Al Azhar akan melakukan kurban dua belas ekor sapi dan empat ekor kambing," jelas Pak Yes.

Sebelum melakukan peninjauan, orang nomor satu di Kota Soto juga sudah melakukan sholat Idul Adha 1445 H bersama masyarakat, di Masjid Agung Lamongan. Yangmana dipimpin oleh imam Ahmad Muhlas dari Pondok Pesantren Al Ma'arif Dua Lamongan.

Adapun ceramah dari Khotib Kharisuddin Aqib yang juga merupakan Dosen Pasca Sarjana Uinsa dan pengasuh Pondok Pesantren Ulil Al Bab di Nganjuk, momen Idul Adha merupakan momen untuk bersyukur dan meningkatkan keimanan


Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

|        |                                    |  |
|--------|------------------------------------|--|
| Title  | Manuver Adnan Ganggu Fatmawati     | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                       |  |
| Media  | Fajar Makasar                      |  |
| Page   | 1 Part 1                           |  |
| Author | Widyawan Setiadi & M Takdir Ridwan |  |

# Manuver Adnan Ganggu Fatmawati



|        |                                    |  |
|--------|------------------------------------|--|
| Title  | Manuver Adnan Ganggu Fatmawati     | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                       |  |
| Media  | Fajar Makasar                      |  |
| Page   | 1 Part 2                           |  |
| Author | Widyawan Setiadi & M Takdir Ridwan |  |

# Manuver Adnan Ganggu Fatmawati

❖ Lanjutan **Halaman 1**

Jika kader tak digandeng, bisa jadi Nasdem menarik dukungan untuk Sudirman. Apalagi belum ada restu dari DPP.

Sudirman bisa saja mendapatkan Gerindra, namun bakal alot. Ketua DPD Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras juga ngotot maju di Pilgub Sulsel. Dia bahkan telah membuka komunikasi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Makanya, situasi politik masih sangat cair. Manuver sejumlah figur akhir-akhir ini menandakan Pilgub Sulsel ini masih sangat mungkin terjadi perubahan

an koalisi dan pasangan. Namun Nasdem punya daya tawar tinggi sebagai pemenang pemilu di Sulsel.

Partai Nasdem seharusnya mengusung kader sendiri. Fatmawati juga berpeluang berpasangan dengan Adnan, Danny Pomanto, maupun Indah Putri Indriani. Pada Pemilu 2024, Nasdem meraih 17 kursi di DPRD Sulsel, menggeser Partai Golkar.

Pakar politik Universitas Hasanuddin Prof Sukri Tamma, menilai potensi Andi Sudirman dan Adnan berpasangan cukup terbuka. Mengingat, kondisi politik saat ini masih sangat cair. Terlebih lagi, penajakan masih terus

berlangsung. Termasuk pertemuan antara Ketua DPD Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

"Itu menandakan bahwa Pilgub ini masih sangat mungkin terjadi perubahan koalisi dan pasangan. Makanya semuanya masih simulasi," ujarnya kepada FAJAR, Selasa, 18 Juni.

Lebih lanjut Sukri menilai, jika nantinya Andi Sudirman Sulaiman (ASS) dan Adnan benar berpasangan, maka itu dianggap sebagai dua aktor yang pas. Sebab, keduanya dianggap punya kesamaan dan sama-sama memiliki kelebihan.

Misalnya saja dalam hal

geopolitik. Andi Sudirman bisa menjadi representasi Bonedans sekitarnya kemudian Adnan mewakili Gowa dan sekitarnya. Keduanya juga punya pengalaman menjadi kepala daerah, sama-sama figur muda, dan punya prestasi bagus.

"Kemudian keduanya mewakili etnis masing-masing, juga punya orang besar di belakangnya," tuturnya.

Namun begitu, kendala bagi dua figur ini adalah partai politik. Tiket mereka akan cenderung sulit tanpa sokongan parpol yang bagus, sebab keduanya tidak menjadi representasi partai politik tertentu.

"Meskipun sebenarnya dua figur ini punya

kedekatan dengan parpol tertentu. Makanya kalau mereka berhasil yakinkan parpol, akan sangat kuat," tuturnya.

Saat Adnan menemui Andi Amran Sulaiman Senin, 17 Juni kemarin, keduanya membahas seputar Pilgub Sulsel. Meski tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit saja, tetapi keduanya sudah saling menyampaikan banyak hal mengenai Pilgub.

Itu ditegaskan oleh juru bicara Kerabat Adnan, Ian Latanro. Dia mengatakan, Bupati Gowa dua periode tersebut mengungkapkan alasannya mengapa baru kali ini menemui Amran Sulaiman. "Pada prinsipnya, Pak Adnan datang silaturahmi menyampaikan kenapa selama ini tidak sempat datang, karena memang waktunya dirasa belum pas," ujarnya.

Lebih lanjut Ian mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Adnan mengaku masih menunggu restu dari istana, apakah dirinya harus ambil bagian maju di Pilgub Sulsel atau tidak.

"Beliau (Adnan) menyampaikan ke Pak Amran bahwa dia sangat patuh dan tertib terhadap apa yang menjadi arahan istana. Artinya, semuanya dikasih clear tadi dalam pertemuan," jelasnya.

Ian juga menyampaikan, pada pertemuan itu Adnan menyampaikan dirinya kerap diundang untuk bertemu Amran. Namun dia memastikan tidak ada tawaran dari Amran untuk Adnan dalam pertemuan tersebut, sehingga masih menunggu waktu yang tepat untuk memenuhi undangan.

"Pembicaraan tidak sampai ke situ, jadi tadi sebetulnya lebih ke meng-

dear-kansituasi bahwaseti- ap diundang selalu seperti menghindari, jangansampai nanti dianggap sombong," jelasnya.

Ian bahkan memastikan pihak jagoannya itu membuka peluang untuk berpaket dengan siapa saja di Pilgub Sulsel. Termasuk membuka peluang untuk menjadi calon wakil atau O2 di Pilgub.

Amran Sulaiman sendiri tidak menampik hal itu. Dia juga membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun dia mengaku pertemuan hanya silaturahmi biasa.

Berkaitan dengan isi pertemuan, Amran masih enggan membeberkan lebih jauh apakah ada pembahasan terkait Pilgub Sulsel, khususnya paket pasangan Andi Sudirman dengan Adnan, ataukah arah yang lain.

"Iya, itu silaturahmi," singkat Amran, usai menghadiri pemotongan hewan kurban ASS Foundation di Gedung Brigade Siaga Bencana BPBD Sulsel.

## Jadi Ancaman

Posisi Adnan juga dianggap bisa mengancam posisi Fatmawati Rusdi. Sejauh ini, Fatma sudah dideklarasikan Nasdem sebagai pendamping Andi Sudirman. Akan tetapi, sampai saat ini Nasdem belum juga mengeluarkan rekomendasi format B1 KWK.

Sehingga, posisi Adnan yang muncul belakangan dinilai punya nilai tawar lebih. Itu terbukti dengan dilirikannya Adnan oleh sejumlah figur, termasuk Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), juga Andi Sudirman Sulaiman (ASS).

"Adnan muncul belakangan dan memberikan nilai tawar lebih. Adnan dan Andi Sudirman pasti

punya hitungan sendiri, tidak mungkin memutuskan maju dan bertarung kalau tidak punya hitungan," kata Ian.

Kemudian, sempat juga beredar bahwa Adnan bakal berkostum Nasdem. Sehingga, ada kemungkinan juga hal itu terjadi jika Adnan dinilai punya nilai tawar yang lebih tinggi dibanding Fatma.

Namun sekali lagi, dalam prosedur partai, penentunya adalah DPP. Sehingga, siapa pihak yang lebih mampu meyakinkan DPP maka dialah yang akan mendapat tiket. "Soal Adnan dinasdemkan atau tidak, saya rasa itu keputusan DPP," jelasnya.

## Parpol Pengikut

Sementara analisis Direktur Indeks Politika Indonesia (IPI) Suwadi Idris menganggap parpol hanya pendukung. Suwadi sempat membeberkan kepada publik bahwa Pilgub Sulsel sudah terkonstruksi. Semua hanya akan bergantung dengan keputusan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman (AAS).


"Dia mau kasih tiga paslon, dua paslon, atau kotak kosong. Kita tunggu saja parpol diambil," ujarnya.

Dia menilai, ada dua kekuatan besar yang dimiliki AAS, sehingga dianggap mampu mengontrol pola Pilgub Sulsel mendatang. Pertama, karena Amran punya posisi strategis sebagai Menteri Pertanian, sehingga cukup dekat dengan Prabowo Subianto sebagai sesama menteri.

Selain itu, dia juga menganggap bahwa Amran adalah figur yang punya andil besar memenangkan Prabowo di Sulsel Kedua, punya kekuatan finansial. (\*)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMENTAN

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | ORI Klaim Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp 687 Miliar | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024   |  |
| Media  | Jawa Pos   |  |
| Page   | 8  |  |
| Author | Elo/c7/ttg   |  |

# ORI Klaim Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp 68,7 Miliar

## Aduan Publik Terbanyak di Bidang Perekonomian

**JAKARTA** – Pelayanan publik sektor perekonomian belum maksimal. Itu terbukti dari banyaknya laporan yang diterima Ombudsman RI (ORI) di bidang tersebut. Tercatat, kerugian masyarakat selama Januari–5 Juni 2024 mencapai Rp 68,7 miliar.

Anggota ORI Yeka Hendra Fatika memaparkan, valuasi kerugian masyarakat dihitung berdasar nilai kerugian materiil pada setiap laporan. Khususnya, laporan yang telah ditutup dan memperoleh penyelesaian permasalahan.

"Setiap ada yang melaporkan, kami selalu tanya nilai kerugiannya," kata Yeka di Jakarta kemarin (18/6).

Dari situ, realisasi penyelamatan kerugian dihitung berdasar aduan yang terselesaikan. Yeka mengklaim

sejak 2021 hingga Juni 2024, potensi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan pelayanan publik di sektor perekonomian mencapai Rp 485,4 miliar.

Namun, total realisasi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan tersebut mencapai Rp 398,9 miliar atau sekitar 82,19 persen dari total potensi penyelamatan. Aduan paling banyak yang diterima ORI terkait bidang perekonomian selama tiga tahun ini adalah pelayanan perbankan, asuransi, dan jaminan dengan 124 aduan.

Disusul sektor perdagangan, industri, dan logistik dengan 75 aduan. Untuk sektor pertanian dan pangan tercatat 19 aduan. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa sebanyak 16 aduan serta perpajakan, kepabeanan, dan percukaian dengan 8 aduan.

Adapun untuk instansi yang paling

### RAGAM ADUAN SEKTOR PEREKONOMIAN

Yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman 2021–Juni 2024


- 1 Sektor perbankan, asuransi, dan jaminan (124 aduan)
- 2 Sektor perdagangan, industri, dan logistik (75 aduan)
- 3 Bidang pertanian dan pangan (19 aduan)
- 4 Sektor pengadaan barang dan jasa (16 aduan)
- 5 Sektor perpajakan, kepabeanan, dan percukaian (8 aduan)



Sumber: Ombudsman ORI

HERLAMBAH/JAWA POS

banyak melaporkan ke ORI ada lima. Yakni, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, serta PT Perikanan Indonesia. "Untuk lembaga yang mendapatkan pengaduan itu, ORI telah memberikan tindakan korektif lewat laporan hasil pemeriksaan (LHP)," katanya. (elo/c7/ttg)

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | ORI Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp687 Miliar | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                                    |  |
| Media  | Batam Pos                                       |  |
| Page   | 3   |  |
| Author | JP Group & Yusuf Hidayat                        |  |

# ORI Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp68,7 Miliar

**Reporter** : JP GROUP  
**Editor** : YUSUF HIDAYAT

**JAKARTA (BP)** - Pelayanan publik sektor perekonomian belum maksimal. Terbukti, dari banyaknya laporan yang diterima Ombudsman RI (ORI) dalam bidang itu. Tercatat, kerugian masyarakat selama Januari-5 Juni mencapai Rp68,7 miliar.

Anggota ORI Yeka Hendra Fatika memaparkan, valuasi kerugian masyarakat dihitung berdasarkan nilai kerugian materiil pada setiap laporan. Khususnya, laporan yang telah ditutup dan telah memperoleh penyelesaian permasalahan.

"Setiap ada pelapor yang melaporkan, kami selalu tanya nilai kerugiannya," terangnya. Dari situ, realisasi penyelamatan kerugian dihitung berdasarkan aduan yang terselesaikan.

Yeka mengklaim, sejak 2021 hingga Juni 2024, potensi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan pelayanan

publik di sektor perekonomian mencapai Rp485,4 miliar. Namun, total realisasi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan tersebut mencapai Rp398,9 miliar atau sekitar 82,19 persen dari total potensi penyelamatan.


Aduan paling banyak yang diterima ORI terkait bidang perekonomian selama tiga tahun ini adalah pelayanan perbankan, asuransi, dan jaminan dengan 124 aduan. Di susul sektor perdagangan, industri, dan logistik dengan 75 aduan. Sementara sektor pertanian dan pangan tercatat ada 19 aduan. Sementara pengadaan barang dan jasa sebanyak 16, serta perpajakan, kepabeanan dan percukaian dengan 8 aduan.

Sementara untuk instansi yang paling banyak melaporkan ke ORI ada lima. Yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Keuangan,

Kementerian Pertanian, dan PT Perikanan Indonesia."Untuk lembaga yang mendapatkan pengaduan itu, ORI telah memberikan tindakan korektif. Lewat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)," katanya.

Dari tindakan korektif itu, beberapa lembaga sudah melakukan penyelesaian atas aduan masyarakat tersebut. Di Bappebti semisal, ada 15 laporan tentang maladministrasi perdagangan berkangka komoditas telah diselesaikan. Sementara di Kementan, teguran ORI mengenai kebijakan tata kelola impor bawang putih belum mendapat penyelesaian.

"Ombudsman mengapresiasi instansi baik kementerian maupun lembaga yang telah menjalankan Tindakan Korektif dari ORI," katanya. Respons dalam pemecagah aduan ini menjadi wujud pemerintah hadir dalam memberikan pelayanan publik di sektor perekonomian. (\*)

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | ORI Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp687 Miliar | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                                    |  |
| Media  | Radar Bandung                                   |  |
| Page   | 2   |  |
| Author | Elo   |  |

# ORI Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp68,7 Miliar

**JAKARTA** - Pelayanan publik sektor perekonomian belum maksimal. Terbukti, dari banyaknya laporan yang diterima Ombudsman RI (ORI) dalam bidang itu. Tercatat, kerugian masyarakat selama Januari- 5 Juni mencapai Rp68,7 miliar.

Anggota ORI Yeka Hendra Fatika memaparkan, valuasi kerugian masyarakat dihitung berdasarkan nilai kerugian materiil pada setiap laporan. Khususnya, laporan yang telah ditutup dan telah memperoleh

penyelesaian permasalahan." Setiap ada pelapor yang melaporkan, kami selalu tanya nilai kerugiannya," terangnya. Dari situ, realisasi penyelamatan kerugian dihitung berdasarkan aduan yang terselesaikan.

Yeka mengklaim, sejak 2021 hingga Juni 2024, potensi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan pelayanan publik di sektor perekonomian mencapai Rp 485,4 miliar. Namun, total realisasi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan tersebut

mencapai Rp 398,9 miliar atau sekitar 82,19 persen dari total potensi penyelamatan.

Aduan paling banyak yang diterima ORI terkait bidang perekonomian selama tiga tahun ini adalah pelayanan perbankan, asuransi, dan jaminan dengan 124 aduan. Di susul sektor perdagangan, industri, dan logistik dengan 75 aduan. Sementara sektor pertanian dan pangan tercatat ada 19 aduan. Sementara pengadaan barang dan jasa sebanyak 16, serta perpajakan,

kepabeanaan dan percukaian dengan 8 aduan.

Sementara untuk instansi yang paling banyak melaporkan ke ORI ada lima. Yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan PT Perikanan Indonesia."Untuk lembaga yang mendapatkan pengaduan itu, ORI telah memberikan tindakan korektif. Lewat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)," katanya. **(elo)**

|        |  |
|--------|--|
| Title  | Pemerintah Harus Tuntaskan Judol dan Darurat Pornografi Anak |
| Date   | 19 Juni 2024   |
| Media  | Pos Kota   |
| Page   | 10   |
| Author | Toga   |



Kementerian Pertanian

## Pemerintah Harus Tuntaskan Judol dan Darurat Pornografi Anak

**JAKARTA (Poskota)**

- Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mendesak pemerintah untuk harus hadir menyelesaikan permasalahan judi online atau judol yang marak di Indonesia.

"Judi online ini sebenarnya sudah kami teriakkan sejak tiga tahun yang lalu bahwa ini sangat berbahaya. Dan karenanya pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya," ujar Hidayat, saat acara Tebar Kurban di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Hidayat menjelaskan, saat ini permasalahan judi online telah merusak lebih dari 3,5 juta warga Indonesia. Dimana 80 persen di antaranya adalah masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah.

Hidayat mengungkapkan, dampak judi online menjadi perhatian serius,

dimana baru-baru ini Indonesia digemparkan berita seorang polisi wanita yang membunuh suaminya karena permasalahan judi online.

"Sehingga memang menjadi permasalahan yang penting untuk kita pertimbangkan, terkait dengan dimensi akhlak dan moral," katanya.

Selain itu, Hidayat juga menekankan mengenai persoalan pornografi anak yang terjadi di Indonesia.

Menurutnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadinya darurat pornografi anak selama tiga tahun terakhir.

Puncak persoalan pornografi anak adalah ketika seorang ibu muda terpengaruh iming-iming uang sampai-sampai rela melakukan aksi pornografi kepada anaknya yang masih dibawah umur.

"Sudah sejak periode

yang lalu kami meneriakan agar satu-satunya kementerian yang membawa nama perlindungan anak yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ditingkatkan kewenangannya. Sehingga dia tidak hanya kementerian yang bersifat koordinatif tapi juga harus menjadi kementerian yang teknis, seperti Kemempora dan Kementan," jelasnya.


Di samping itu, anggaran untuk Kementerian PPPA juga harus dinaikkan untuk meningkatkan kondisi-kondisi kedaruratan, salah satunya darurat pornografi anak.

"Anggaran tidak pernah naik lebih dari Rp325 miliar setiap tahun, bahkan tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Kalaupun ada kenaikan, itu tidak terkait dengan perlindungan anak," tutupnya. **(toga)**



Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid alias HNWW.


Poskota/ist

|        |                                  |   |
|--------|----------------------------------|---|
| Title  | PANEN PADI BERAS MERAH           |  |
| Date   | 19 Juni 2024                     |   |
| Media  | Media Indonesia                  |   |
| Page   | 7                                |   |
| Author | Antara Foto/Nyoman Hendra Wibowo |   |



ANTARA/NYOMAN HENDRA WIBOWO

**PANEN PADI BERAS MERAH:** Petani menjemur padi beras merah saat masa panen raya di Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali, kemarin. Tradisi panen padi beras merah yang digelar setiap Juni itu menjadi daya tarik pariwisata di kawasan objek wisata yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia tersebut.

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Pemerintah Perlu Memastikan Pasokan Air Lahan Pertanian | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024  |  |
| Media  | Media Indonesia   |  |
| Page   | 8   |  |
| Author | Fal/RF/E-2  |  |

# Pemerintah Perlu Memastikan Pasokan Air Lahan Pertanian

PENELITI Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Eliza Mardian meminta pemerintah untuk menjaga ketersediaan air dalam menghadapi masuknya musim kemarau. Langkah itu penting untuk menjaga produktivitas pertanian.

“Ketersediaan air ini menjadi kunci karena setiap tanaman membutuhkan air. Ketika kemarau, curah hujan relatif sedikit, ini yang menyebabkan petani kerap menggunakan air sungai untuk mengairi tanamannya,” ucapnya, kemarin.

Untuk bisa mengalirkan air dari sungai ke lahan, sambung Eliza, para petani membutuhkan mesin pompa dan membutuhkan solar untuk bahan bakar mesin pompa tersebut. Pemerintah mesti memastikan ketersediaan solar dan dengan harga yang terjangkau bagi petani.

“Petani kerap kesulitan mendapatkan solar karena aksesnya yang cu-

kup jauh dari SPBU. Pemerintah perlu jemput bola dengan menyediakan program solar keliling agar petani terbantu,” ungkap dia.

Selain itu, pemerintah juga mesti mengencangkan penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan, tahan terhadap hama penyakit dan tanaman, serta pendampingan yang intensif dari penyuluh agar dapat memonitoring tanaman tersebut.

Sementara itu, untuk jangka menengah dan panjang, Eliza mengusulkan pemerintah memperbaiki infrastruktur irigasi dan pembangunan embung yang didukung dengan anggaran yang memadai.


“Pembangunan embung ini kerap kali mengalami kesulitan karena rumitnya pembebasan lahan untuk dibangun embung, biaya pembangunan, dan perawatannya. Embung ini dapat menjadi alternatif solusi

agar petani tidak perlu jauh-jauh memompa air dari sungai yang akan menelan biaya cukup besar karena untuk membeli solar subsidi,” ujarnya.

Guna mengantisipasi padi gagal panen saat musim kemarau nanti, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengingatkan petani untuk segera mengasuransikan sawahnya.

Sayangnya, kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel Edi Romdhoni, tingkat kesadaran masyarakat untuk mengasuransikan sawahnya masih rendah. Sehingga ketika sawah yang ditanami gagal panen akibat musim kemarau dan hama, petani mengalami kerugian.

“Memang kesadaran petani kita terhadap asuransi ini masih minim, tapi kita terus menyosialisasikannya kepada para petani,” kata Edi. (Fal/RF/E-2)

|        |                                     |  |
|--------|-------------------------------------|--|
| Title  | Harga Pangan makin tidak Terkendali | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                        |  |
| Media  | Media Indonesia                     |  |
| Page   | 7                                   |  |
| Author | Surya Sriyanti                      |  |

# Harga Pangan makin tidak Terkendali

*Lonjakan harga terjadi bukan hanya karena banyaknya permintaan, melainkan juga karena gagal panen sudah terjadi di banyak daerah.*

**SURYA SRIYANTI**  
surya@mediaindonesia.com

**H**ARGA bahan pangan pokok di berbagai daerah masih tidak terkendali. Meski puncak perayaan Idul Adha sudah terlewati, harga komoditas pangan tetap bertahan tinggi.

Dedi, pedagang pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat, mengungkapkan kenaikan harga yang terjadi ternyata bukan hanya karena banyaknya permintaan, melainkan juga karena gagal panen sudah terjadi di banyak daerah. Alhasil, stok tidak mampu mencukupi kebutuhan dan membuat harga terus menanjak.

“Cabai merah, bawang merah, harganya merangkak naik lantaran pasokan dari luar daerah semakin sedikit. Banyak petani gagal panen,” ujar Dedi di Tasikmalaya, kemarin.

Cabai merah kini dibanderol seharga Rp70 ribu/kilogram (kg) dari semula Rp30 ribu/kg. Bawang merah juga melonjak menjadi Rp55 ribu/kg

dari semula Rp40 ribu/kg.

“Permintaan masih ramai, tapi pasokan tak maksimal. Para petani di daerah gagal panen dan sekarang mereka baru tanam kembali,” jelasnya.

Di Purwokerto, Jawa Tengah, hal serupa juga terjadi. Harga telur dan daging ayam melompat hingga Rp7 ribu/kg.

Berdasarkan pantauan di Pasar Purwosari, Kecamatan Baturaden, sehari sebelum Idul Adha, telur masih dijual seharga Rp27 ribu/kg. Kini, harganya justru meroket ke level Rp35 ribu/kg. Harga daging ayam juga membumbung dari Rp35 ribu/kg menjadi Rp38 ribu/kg.

“Di Pasar Wage bahkan sudah mencapai Rp40 ribu/kg. Kenaikan ini sudah terjadi sejak Idul Fitri dan tidak kunjung turun,” ujar Tri, seorang pedagang di Pasar Purwosari.

Di pulau lain, situasi tidak jauh berbeda. Nilai jual daging ayam di Pasar Kahayan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyentuh Rp48 ribu/kg.

Mariani, penjual ayam potong, mengatakan lonjakan harga sudah terjadi sejak tiga bulan silam. Harga terus merangkak naik hingga berada di titik sekarang.

“Harga ini sudah tinggi dari distributornya sehingga pedagang ikut menyesuaikan. Kami sebenarnya ingin harga tetap stabil. Kalau naik, pelanggan pasti akan mengurangi pembelian sehingga penjualan ayam potong kami juga ikut turun,” paparnya.

## Pemda klaim aman

Kendati demikian, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengklaim stok masih dalam kondisi aman. Adapun kenaikan harga terjadi karena memang permintaan tinggi menjelang hari besar keagamaan.


“Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan para pedagang dan distributor untuk memastikan pasokan bahan pokok seperti beras, daging ayam, telur ayam, gula, cabai, bawang merah, dan bawang putih mencukupi,” tegas Zaini.

Ia juga memastikan pihaknya melakukan pengawasan terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia mengimbau kepada seluruh pedagang untuk bersama-sama menjaga harga tetap stabil serta tidak menaikkan harga secara tidak wajar.

“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap harga bahan pokok untuk mencegah lonjakan yang tidak wajar hingga menyebabkan inflasi,” tandasnya.

Di Tanah Datar, tidak hanya harga bahan pangan pokok yang melambung, bumbu-bumbu masakan juga terkerek. Harga santan dan bumbu-bumbu halus untuk mengolah daging naik karena permintaan yang tinggi.

“Harga perbumbuan memang sedikit naik dari sebelumnya karena stok barang sudah mulai berkurang,” tutur Aziz, pedagang bumbu di Pasar Busur, Sumatra Barat. (TS/YH/AD/Z-11)

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | HET Minyakita tidak Perlu Buru-Buru Dinaikkan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                                  |  |
| Media  | Media Indonesia                               |  |
| Page   | 8   |  |
| Author | Fal/E-2                                       |  |

# HET Minyakita tidak Perlu Buru-Buru Dinaikkan

PENGAMAT pertanian Syaiful Bahari menilai belum saatnya pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Pasalnya, produksi sawit dan CPO tengah surplus saat ini.

"Sebenarnya pemerintah tidak perlu menaikkan HET Minyakita karena sampai saat ini produksi sawit dan CPO nasional tetap surplus, bahkan produksi CPO di 2023 meningkat 7,15% mencapai 50,07 juta ton. Sedangkan konsumsi minyak sawit di tahun yang sama sebesar 23,13 juta ton, itu pun sudah termasuk untuk program biodisel," kata Syaiful saat dihubungi kemarin.

Ia menerangkan, saat ini pemerintah sudah mempunyai instrumen kebijakan *domestic market obligation* (DMO) dan *domestic price obligation* (DPO). Kebijakan tersebut mewajibkan produsen dan eksportir CPO untuk mengalokasikan sebagian CPO-nya untuk produksi minyak goreng di dalam negeri.

"Persoalannya apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan secara benar? Lebih baik tuntaskan kebijakan tersebut daripada menaikkan HET Minyakita," sebut dia.

Apabila HET Minyakita naik, lanjut dia, harga minyak goreng komersial akan ikut terkerek naik di atas harga sekarang.

"Ini sama saja dengan memberi karpet merah kepada pelaku industri minyak goreng komersial untuk menaikkan harga di pasar. Maka yang menjadi korban adalah masyarakat sebagai konsumen," ungkap dia.


Kenaikan HET Minyakita, diyakini akan menambah beban masyarakat yang saat ini sudah terpuruk akibat naiknya bahan pokok lain seperti beras dan cabai.

HET Minyakita ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 41/2022 yakni Rp14.000 per liter. Sejak ditetapkan, HET itu belum pernah mengalami kenaikan sampai saat ini.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut usulan kenaikan HET Minyakita akan terjadi setelah Idul Adha 2024. Usulan itu akan disampaikan saat melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Ya, tunggu rapat ya. Mudah-mudahan habis Lebaran (Idul Adha)," ujar Zulkifli.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan, kenaikan HET Minyakita akan diusulkan sebesar Rp1.500 sehingga harganya menjadi Rp15.500 dari sebelumnya Rp14.000. (Fal/E-2)

|        |                              |  |
|--------|------------------------------|--|
| Title  | Kurban dan Swasembada Daging | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                 |  |
| Media  | Media Indonesia              |  |
| Page   | A1                           |  |
| Author | Imron Rosyadi                |  |

# Kurban dan Swasembada Daging

**Imron Rosyadi**

Peneliti Pusat Studi Halal (PSH)  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**I**BADAH kurban di Hari Raya Idul Adha tidak hanya berlimpah pada menguatnya kesalihan sosial, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kinerja sektor pertanian. Itu disebabkan pada musim kurban terjadi lonjakan permintaan hewan ternak, antara lain sapi, kambing, atau domba, dan kerbau di pasaran.

Kementan (2023) mencatat proyeksi permintaan hewan kurban pada 2023 seperti kambing mencapai 743.672 ekor, sapi (650.282 ekor), domba (332.770 ekor), dan kerbau (16.327 ekor) sehingga total permintaan hewan kurban menjadi 1.743.051 ekor. Berdasarkan data itu, terdapat kenaikan sebesar 2% jika dibandingkan dengan 2022. Namun yang menghekan, fenomena kelangkaan daging sapi, terutama menjelang puasa/Lebaran, kerap kali menghebohkan. Bahkan, hingga saat ini masih menyita perhatian publik lantaran harga daging sapi di pasaran masih relatif mahal, yakni mencapai kisaran Rp120 ribu hingga Rp140 ribu/kg.

## Tantangan

Oleh karenanya, untuk memenuhi permintaan daging sapi, biasanya pemerintah memutuskan untuk mengimpor daging sapi, antara lain berasal dari Selandia Baru, Australia, Meksiko, dan daging kerbau dari India.

BPS (2024) mencatat volume impor daging sejenis lembu (sapi, kerbau, dan sejenisnya) sepanjang 2023 meningkat sebesar 5,67% (y-o-y) atau meningkat menjadi sebesar 238,43 ribu ton ketimbang pada 2022. Walhasil, angka itu merupakan volume impor daging tertinggi sejak 2018.

Sementara itu, tahun ini sudah tersedia daging beku impor sebanyak 146.243 ton di pasaran dengan harga konsumen maksimal Rp80.000/kg dan sejauh ini sudah ada sekitar 700 ton daging kerbau yang didatangkan dari India serta dijual di pasaran sekitar Rp.65.000/kg.

Namun, pertanyaannya, mengapa penyediaan hewan kurban yang rutin terjadi setiap tahun itu tidak seheboh fenomena kelangkaan daging sapi? Bahkan nyaris tidak terdengar 'kesibukan' pemerintah akan mengimpor hewan ternak untuk menutup kebutuhan kurban di Tanah Air.

Kemungkinan jawabannya ialah kebutuhan hewan kurban sudah dan/atau sebagian besar dapat dipenuhi oleh peternak-peternak sapi lokal, seperti sapi Madura, sapi Jawa Tengah

(Wonogiri, Boyolali, Gunung Kidul, Tegal), sapi Pasundan, sapi Bali, sapi Madura, dan sapi-sapi 'khas' daerah lainnya.

Hal itu mengonfirmasi bahwa sejatinya petani/peternak lokal mampu menyediakan bahan pangan, khususnya sumber protein hewani bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu sepanjang kebijakan di sektor pertanian dan perdagangan pangan berpihak pada 'kepentingan' peternak rakyat.

Maknanya, para peternak domestik diberi kemudahan dari akses terhadap pakan ternak, pemeliharaan, kesehatan ternak, dan akses pasar domestik. Yang terpenting, pemerintah mampu/bersedia melindungi peternak lokal dari ancaman kartel/mafia impor sapi dan atau daging sapi (lihat, Pasal 3 UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).

Kebijakan impor sapi/kerbau, yang seolah dilakukan untuk mengendalikan harga daging sapi di pasar domestik, tidak bisa dimungkiri akan mengancam eksistensi peternak rakyat. Misalnya, banyak pihak yang mempersoalkan daging kerbau yang didatangkan dari India itu belum sepenuhnya bebas penyakit *lumpy skin disease* (LSD) lantaran India belum sepenuhnya dinyatakan sebagai negara yang bebas LSD.

Sementara itu, Indonesia sudah mengantongi sertifikat bebas LSD sehingga dikhawatirkan virus LSD itu akan menular dan mengancam 'kematian' 5 hingga 10 juta ternak rakyat Indonesia. Belum lagi menghadapi persoalan persaingan harga daging sapi impor yang relatif lebih murah juga akan membuat peternak lokal semakin terpukul.

## Terobosan

Untuk mewujudkan swasembada daging, pemerintah dituntut mengambil kebijakan terobosan yang lebih kreatif dan inovatif.

Dalam konteks itu, pemerintah bisa 'mengkreasikan' kampung/desa/pesantren ternak terpilih dan nantinya menjadi

sentra-sentra penghasil ternak sapi, kerbau, kambing, dan hewan ternak lainnya.

Eksistensi kampung ternak/pesantren itu bisa dimulai dengan melakukan pemetaan terhadap desa-desa dan pesantren yang mempunyai potensi besar sebagai penghasil ternak terbaik lantaran dukungan alam dan lingkungan hidup yang kondusif.

Kondusifitas itu antara lain ketersediaan lahan pakan alami yang hijau, lingkungan dan udara yang bersih,

dan sumber daya air yang melimpah serta dukungan pengelolaan limbah ternak yang mendatangkan manfaat energi bagi masyarakat desa.

Pemerintah pun harus hadir dalam rangka penguatan desa-desa/pesantren ternak tersebut dalam tiga hal penting. Pertama, meningkatkan produktivitas dan daya saing peternakan. Kedua, memberikan kemudahan akses permodalan seperti kredit usaha rakyat (KUR). Ketiga, memberikan pelatihan strategi pemasaran, terutama pemasaran digital.

Selain itu, dalam rangka mendukung penguatan rantai nilai industri halal, terutama produk makanan halal, langkah selanjutnya ialah melibatkan desa/kampung/pesantren ternak tersebut dalam jejaring industri makanan halal. Keterlibatannya terutama dalam proses penyediaan bahan (hewan lembu) yang berkualitas, sehat, dan cukup umur untuk dikonsumsi.

Hal itu sejalan dengan amanah UU No 33 Tahun 2024 tentang jaminan produk halal yang menyatakan produk halal dihasilkan melalui proses produk halal, yaitu rangkaian kegiatan (proses) untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.


Demikian pula sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pangan. Pertama, meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri. Kedua, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok, dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri. Keempat, meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan. Kelima, melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional (lihat UU No 18 Tahun 2012).

Dengan demikian, Idul Adha tahun ini tidak sekadar rutinitas ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi inspirasi bangsa untuk mewujudkan swasembada pangan dan pusat industri makanan halal dunia.

Itu disebabkan faktanya setiap ibadah kurban, umat Islam terlibat dalam kegiatan swasembada pangan dan industri halal, yakni meliputi pengadaan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban, dan pendistribusian daging kurban.



|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Selamatkan Rp687 Miliar dari Pengaduan Layanan Publik | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024  |  |
| Media  | Radar Bogor   |  |
| Page   | 9   |  |
| Author | Elo   |  |

# Selamatkan Rp68,7 Miliar dari Pengaduan Layanan Publik

**JAKARTA**—Pelayanan publik sektor perekonomian belum maksimal. Terbukti, dari banyaknya laporan yang diterima Ombudsman RI (ORI) dalam bidang itu. Tercatat, kerugian masyarakat selama Januari- 5 Juni mencapai Rp 68,7 miliar.

Anggota ORI Yeka Hendra Fatika memaparkan, valuasi kerugian masyarakat dihitung berdasarkan nilai kerugian materiil pada setiap laporan. Khususnya, laporan yang telah ditutup dan telah memperoleh penyelesaian permasalahan."Setiap ada pelapor yang melaporkan, kami selalu tanya nilai kerugiannya," terangnya. Dari situ, realisasi penyelamatan kerugian dihitung berdasarkan aduan yang terselesaikan.

Yeka mengklaim, sejak 2021 hingga Juni 2024, potensi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan pelayanan publik di sektor perekonomian mencapai Rp

485,4 miliar. Namun, total realisasi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan tersebut mencapai Rp 398,9 miliar atau sekitar 82,19 persen dari total potensi penyelamatan.

Aduan paling banyak yang diterima ORI terkait bidang perekonomian selama tiga tahun ini adalah pelayanan perbankan, asuransi, dan jaminan dengan 124 aduan. Di susul sektor perdagangan, industri, dan logistik dengan 75 aduan. Sementara sektor pertanian dan pangan tercatat ada 19 aduan. Sementara pengadaan barang dan jasa sebanyak 16, serta perpajakan, kepastian dan percukaian dengan 8 aduan.

Sementara untuk instansi yang paling banyak melaporkan ke ORI ada lima. Yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan

PT Perikanan Indonesia.


"Untuk lembaga yang mendapatkan pengaduan itu, ORI telah memberikan tindakan korektif. Lewat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)," katanya.

Dari tindakan korektif itu, beberapa lembaga sudah melakukan penyelesaian atas aduan masyarakat tersebut. Di Bappebti semisal, ada 15 laporan tentang maladministrasi perdagangan berjangka komoditi telah diselesaikan. Sementara di Kementan, teguran ORI mengenai kebijakan tata kelola impor bawang putih belum mendapat penyelesaian.

"Ombudsman mengapresiasi instansi baik kementerian maupun lembaga yang telah menjalankan Tindakan Korektif dari ORI," katanya. Respon dalam pemecagah aduan ini menjadi wujud pemerintah hadir dalam memberikan pelayanan publik di sektor perekonomian. (elo)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Title  | Bapanas Berupaya Entaskan Kemiskinan Ekstrem dengan Intervensi Pangan |  |
| Date   | 19 Juni 2024  |   |
| Media  | Neraca  |   |
| Page   | 6   |   |
| Author | Bari/ant  |   |

## Bapanas Berupaya Entaskan Kemiskinan Ekstrem dengan Intervensi Pangan


### NERACA

Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ada di seluruh Indonesia dengan menggenjatkan intervensi pengendalian kerawanan pangan kepada keluarga rentan. "Intervensi pengendalian kerawanan pangan dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan kepada keluarga rawan pangan, yaitu kelompok pengeluaran 10 persen terbawah/desil 1 sebagai sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan di Jakarta, kemarin.

Arief menyampaikan bahwa Bapanas mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 melalui kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan yang diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen. "Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem," ucap Arief.

Arief menyampaikan bahwa pihaknya telah meluncurkan penyaluran secara simbolis bantuan pangan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2024 pada Rabu (12/6) di Cilacap, Jawa Tengah. Pemberian bantuan pangan menurutnya bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran kepala keluarga (KK) dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan.

Ia mengatakan upaya pengentasan kemiskinan diyakini akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan. "Ini tidak ada kaitannya dengan politik karena tugas negara menjaga kesejahteraan masyarakat," kata Arief. Ia menegaskan bahwa hal itu sejalan dengan amanat yang diemban Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021, di mana salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan fungsi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan. ● bari/ant

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Idul Adha 2024, PNM Optimalkan Penyaluran Hewan Kurban di Daerah Tertinggal | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024  |  |
| Media  | Neraca  |  |
| Page   | 9   |  |
| Author | Mohar   |  |

# Idul Adha 2024, PNM Optimalkan Penyaluran Hewan Kurban di Daerah Tertinggal

Jakarta - Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menyalurkan hewan kurban di berbagai titik 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) di Indonesia. Lokasi penyaluran tersebut diantaranya berada di Aceh, Palembang, Lampung, Garut, Serang, Banjarmasin, Purwokerto, Solo, Mataram, dan Makassar.

## ■ NERACA

Diakui oleh Direktur Utama PNM Arief Mulyadi pemilihan lokasi kurban pada tahun ini sengaja difokuskan bagi mereka yang sulit secara akses dan memiliki kondisi khusus dengan angka stunting paling tinggi.

"Momentum kurban tahun ini selain bernilai ibadah di Hari Raya Idul Adha juga sebagai bentuk komitmen PNM mendukung program zero stunting di Indonesia," ungkap Arief, Senin (17/6).

Kurban tahun ini juga menjadi wujud syukur pe-

rusahaan yang telah 25 tahun dipercaya mengabdikan untuk negeri khususnya dalam memberdayakan ultra mikro Indonesia.

Momentum Idul Adha sekaligus kesempatan bagi PNM untuk berbagi di daerah 3T yang di dalamnya juga terdapat nasabah binaan PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekkaar).

"Penyerahan hewan kurban di daerah 3T melalui masjid terdekat dari unit setempat dengan tampilan yang paling sederhana secara bangunan. Karena biasanya semakin besar dan bagus suatu masjid, yang

berkurban di sana juga semakin banyak. Jadi kamiimbau untuk pilih yang sederhana mungkin," tambahnya.

Arief turut menyampaikan rasa terima kasih kepada nasabah PNM Mekaar yang sudah mempercayakan PNM dalam memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada perempuan pelaku usaha (UMi) untuk menjalani usaha. Tidak hanya itu, ia juga mengapresiasi Account Officer (AO) yang telah berjuang keras memberi pendampingan hingga pelosok negeri.

"Saya berharap, kurban dari PNM dapat terus menumbuhkan asa pejuang ultra mikro baik itu nasabah maupun teman-teman AO yang setiap hari berkorban melalui jalur yang sulitnya luar biasa," tutupnya.


PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban tugas khusus memajukan ekonomi kerakyatan dengan

memberikan pembiayaan, pendampingan dan pembinaan usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dalam merealisasikan komitmen untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada nasabah, PNM melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) memberikan pendampingan dan pembinaan usaha kepada nasabah, baik berupa pelatihan tematik hingga pembinaan dan pelatihan kelompok usaha (klaster) yang berdasarkan pada kesamaan wilayah ataupun jenis usaha.

Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2016, PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok ● mohar

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Idul Adha, Harga Bapokting di Kabupaten Sukabumi Relatif Stabil | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024  |  |
| Media  | Neraca  |  |
| Page   | 9   |  |
| Author | Ron   |  |

# Idul Adha, Harga Bapokting di Kabupaten Sukabumi Relatif Stabil

## NERACA

Sukabumi - Hari besar keagamaan biasanya sering terjadi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok penting (Bapokting). Namun berbeda pada perayaan idul adha 1445 H.


Harga Bapokting pada idul adha, relatif stabil, ke dari ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga di sejumlah Pasar Semi Modern (PSM) Kabupaten Sukabumi, namun masih dalam hitungan wajar.

Berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Sukabumi, ketersediaan kebutuhan pokok masih aman.

Enumerator (pencatat data/harga) di sejumlah Pasar Semi Modern mencatat kestabilan harga diprediksi karena ketersediaan bahan baku yang masih melimpah.

Pantauan dilapangan Selasa (18/06), komoditi yang sudah mengalami kenaikan harga saat ini, tambah dia, yakni kentang dari Rp 17 ribu per kilogram naik sebesar Rp 5.000, menjadi Rp 22 ribu per kilogram.

Kemudian cabai keriting ataupun cabai besar dari Rp 50 ribu naik Rp 20 ribu menjadi Rp70 ribu, dan beras jenis premium naik menjadi Rp16 ribu. "Kami terus berupaya melakukan pemantauan harga untuk menginformasikan lebih update kepada masyarakat dan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait," ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Dani Tarsoni. ●ron

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | IKM Dukung Percepatan Diversifikasi Pangan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024                               |  |
| Media  | Neraca                                     |  |
| Page   | 10   |  |
| Author | Gro  |  |

# IKM Dukung Percepatan Diversifikasi Pangan

## NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu peningkatan produksi pangan dalam negeri guna menjaga dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengembangan industri pangan dilakukan melalui hilirisasi produk pertanian sehingga tercipta diversifikasi produk pangan yang memanfaatkan sumber daya atau bahan baku lokal dengan meningkatkan nilai tambahnya.

"Pengembangan industri pangan masih memiliki prospek yang besar, sehingga diharapkan ke depannya hilirisasi produk pertanian dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita.

Menurut Reni, komoditas agribisnis dan bahan pangan lokal alternatif merupakan tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Sebab, masyarakat tak hanya membutuhkan bahan pangan yang segar, tetapi juga olahan pangan lanjutan. Contohnya, pelaku industri dapat memanfaatkan bahan baku pengganti beras sebagai sumber karbohidrat, seperti dari singkong, sagu, porang, sorgum, dan lain sebagainya.

"Percepatan hilirisasi komoditas bahan pangan saat ini sangat diperlukan karena besarnya potensi untuk pengembangan produk olahan lanjutan yang dihasilkan dari bahan baku lokal, baik produk antara (intermediate product) maupun produk jadi (end product) yang siap dikonsumsi," papar Reni.

Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Yedi Sabaryadi

mengungkapkan, produk pangan inovatif juga memiliki segmen pasar di sektor ritel. Pada Mei 2024, Ditjen IKMA melaksanakan kegiatan Business Matching yang mempertemukan 47 IKM (industri kecil menengah) pangan terpilih dengan 24 perusahaan ritel yang menghasilkan potensi transaksi mencapai Rp33 miliar.

"Sebanyak 26 IKM peserta Business Matching merupakan alumni program Indonesia Food Innovation (IFI), dan ada satu IKM dengan produk madu mencatatkan potensi transaksi tertinggi senilai Rp1,02 miliar," ungkap Yedi.

Menurut Yedi, percepatan hilirisasi produk agrikultur perlu membutuhkan campur tangan atau kolaborasi berbagai pihak, seperti startup, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, serta IKM teknologi tepat guna, yang dapat menjadi mitra. Sedangkan di rantai produksi industri pangan, para pelaku harus memperhatikan bahan baku pembuatan produk, produksi, hingga tahap distribusi ke tangan konsumen.

Dalam upaya akselerasi bisnis IKM pangan yang memiliki inovasi dalam produk dan/atau prosesnya, serta yang memiliki bahan baku utama sumber daya lokal, Ditjen IKMA rutin menyelenggarakan Program Indonesia Food Innovation (IFI).

Tujuannya, agar IKM pangan siap menjadi industri pangan yang mudah dipasarkan, menguntungkan, dan berkelanjutan (marketable, profitable, dan sustainable). Pendaftaran IFI tahun ini telah dibuka sejak tanggal 6 Juni 2024 melalui laman


[www.ifi.kemenperin.go.id](http://www.ifi.kemenperin.go.id). "Masing-masing komoditas agribisnis tentu memiliki karakteristik yang sangat spesifik, sehingga pengolahannya diperlukan proses yang berbeda bahkan diperlukan inovasi untuk menghasilkan produk yang optimal dan memenuhi kebutuhan pasar. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenperin melalui Ditjen IKMA menyelenggarakan Program IFI," ucap Yedi.

Lebih lanjut, pendaftar IFI terus meningkat setiap tahunnya. Selama empat kali dilaksanakan, jumlah pendaftar mencapai 7.925, dan pada tahun 2023 sebanyak 2.153 pendaftar yang ikut dalam seleksi program IFI. Terdapat 20 peserta yang terpilih mendapatkan pembinaan dalam tahapan food business scale-up melalui coaching, mentoring dan fasilitas pembinaan terkait manajemen, aspek hukum, dan jejaring.

"Dari fasilitasi yang diberikan Ditjen IKMA, terbukti banyak pelaku IKM pangan peserta IFI yang berhasil menaikkan omzet, dengan memperluas potensi pasar, baik nasional maupun ekspor," imbuhnya.

Sebagai contoh, IKM produk olahan susu yang menciptakan keju spesial dengan sentuhan unik pada cita rasa lokal, Rossalie Cheese di Bali.

Dengan bersertifikat HACCP, Rossalie Cheese mampu mengembangkan pasar, menjadi pengganti keju impor ke jaringan premium hotel, premium retail market (Kem Chicks, Pepito, Papaya) dan juga restoran premium di Bali dan kota besar di Indonesia. IKM lain yang berhasil memperluas ekspor. ●

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Ombudsman Sebut Mayoritas Laporan Masuk Terkait Sektor Keuangan | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024  |  |
| Media  | Neraca  |  |
| Page   | 12  |  |
| Author | Ant   |  |

# Ombudsman Sebut Mayoritas Laporan Masuk Terkait Sektor Keuangan

## NERACA

Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan mayoritas laporan masyarakat di sektor perekonomian I yang masuk ke Ombudsman terkait perbankan, asuransi, dan penjaminan atau sektor keuangan.

Adapun ruang lingkup dari sektor perekonomian I meliputi perdagangan, perindustrian, logistik, pertanian, pangan, perbankan, asuransi, penjaminan, pengadaan barang-jasa, perpajakan, pa-bean, serta cukai.

"Ada 124 laporan berproses dan yang sudah diselesaikan terkait substansi ini pada periode 2021-2024," ucap Yeka dalam media briefing update pengawasan pelayanan publik sektor perekonomian I Ombudsman RI di Jakarta,

Jumat (14/6). Setelah substansi perbankan, asuransi, dan penjaminan, dia membeberkan substansi perdagangan, industri, dan logistik serta pertanian dan pangan menjadi substansi terbanyak yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman, dengan masing-masing sebanyak 75 dan 19 laporan.

Selanjutnya, disusul substansi pengadaan barang dan jasa sebanyak 16 laporan serta perpajakan, kepabeanan, dan cukai sebanyak 8 laporan.

Yeka menjelaskan laporan di sektor asuransi cenderung mengenai persoalan masyarakat terkait penyalahgunaan dana asuransi di beberapa perusahaan, salah satunya melibatkan PT Asuransi Jiwasraya, hingga membuat perusahaan asuransi itu mengganti nama. Kemudian laporan di sektor per-

bankan, lanjut dia, permasalahan yang cenderung diadukan masyarakat ke Ombudsman terkait permasalahan sertifikat, di mana belum adanya penyerahan sertifikat saat cicilan rumah masyarakat sudah lunas.

Selain itu, ada pula laporan terkait persoalan kredit pemilikan rumah (KPR) hingga produk keuangan seperti deposito, terutama yang melibatkan oknum sektor keuangan.


Sementara di sektor perdagangan, ia mengungkapkan mayoritas laporan yang masuk salah satunya terkait sistem perdagangan alternatif (SPA), yang memiliki banyak produk hingga lebih dari 300 produk.

"Ini banyak sekali dari jenis kripto hingga emas. Di sini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kami

anggap kurang responsif terhadap perlindungan nasabah," katanya menjelaskan.

Dengan demikian berdasarkan instansi, kata dia, terdapat pula lima instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman kali ini cenderung terkait sektor keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan 94 laporan, Bappebti 30 laporan, Kementerian Keuangan 16 laporan, serta Kementerian Pertanian 14 laporan.


Lalu, PT Perikanan Indonesia 11 laporan, Kementerian Perdagangan 9 laporan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Bank Tabungan Negara (BTN) masing-masing 5 laporan, serta Kementerian Koperasi dan UKM 4 laporan. ● ant

|        |                        |   |
|--------|------------------------|---|
| Title  | PANEN PADI BERAS MERAH |  |
| Date   | 19 Juni 2024           |   |
| Media  | Neraca                 |   |
| Page   | 10                     |   |
| Author | Neraca                 |   |



NERACA/Antarafoto/Nyoman Hendra Wibowo/YU

**PANEN PADI BERAS MERAH : Petani menjemur padi beras merah saat masa panen raya di Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali. Selasa (18/6/2024). Tradisi panen padi beras merah yang digelar setiap bulan Juni tersebut menjadi daya tarik pariwisata di kawasan objek wisata yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia itu.**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Pasca Idul Adha, Sejumlah Komoditas di Kota Sukabumi Turun Harga | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024   |  |
| Media  | Neraca   |  |
| Page   | 9  |  |
| Author | Arya   |  |

# Pasca Idul Adha, Sejumlah Komoditas di Kota Sukabumi Turun Harga

## NERACA

Sukabumi - Pasca Idul Adha 1445 Hijriah, sejumlah komoditas di Pasar Pelita dan Tipar Gede Kota Sukabumi, alami penurunan harga. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) setempat per 18 Mei 2024. Diantaranya, daging ayam broiler dari Rp45 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram, cabai merah besar local semula Rp80 ribu kini di kisaran Rp70 ribu per kilogram.

Kemudian disusul, cabai merah besar TW dengan Harga jual Rp70 ribu, atau turun sekitar Rp5000 per kilogram, dari Harga sebelumnya sebesar Rp70 ribu per kilogram, dan telur ayam

yang turunnya sekitar seribu rupiah, atau dari Rp29 ribu menjadi Rp28 ribu per kilogram.

"Hasil pemantauan kami di lapangan, H+1 Idul Adha Hijriah, sejumlah komoditas memang alami turun Harga," ujar Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri, pada Diskumindag Kota Sukabumi, M. Rifki, kepada Neraca, Selasa (18/6).

Penurunan harga tersebut, lanjut Rifki, salah satunya bisa disebabkan pasokannya meningkat, sedangkan permintaan menurun, sehingga berdampak terhadap turunya harga komoditas tersebut.

"Demand alami penurunan, tapi suplainya meningkat, akhirnya mempengaruhi terhadap harga jual. Tapi, untuk bahan pokok

lainya belum ada perubahan harga," ucap Rifki.


Namun, kata Rifki, untuk Bahan Pokok Penting (Bapokting) lainnya hingga saat ini masih terpantau normal. Seperti, beras Ciherang Cianjur I Rp15 ribu per kilogram, Cianjur II Rp14.800 per kg, Ciherang Sukabumi Rp15 ribu per kilogram, beras premium kelas I sebesar Rp15 ribu per kilogram, medium I Rp13.300 per kilogram, medium lokal Rp13 ribu per kilogram, dan beras medium Bulog Rp12.500 per kilogram, daging sapi Rp130 ribu per kilogram, daging ayam broiler Rp40 ribu per kilogram.

Kemudian, bawang merah jawa dan putih masing-masing masih dijual Rp40 ribu per kilogram, kentang Rp23 ribu per kilogram.

Selain itu juga, sambung Rifki, minyak goreng curah masih bertahan di angka Rp16.500 per kilogram, minyak goreng dalam kemasan di pasar Modern dijual Rp40.200 per 2 liter, sedangkan di Pasar Tradisional per liter Rp17 ribu -19 ribu, terigu masih di angka Rp11 ribu per kg, garam halus 250gr Rp1.500 per bungkus, garam gandu Rp500 per biji, dan gula pasir Rp18 ribu per kilogram.

"Alhamdulillah, untuk ketersediaan termasuk semua stok bapokting dan barang strategis lainnya masih cukup tersedia.

Termasuk juga, dengan penyaluran dan pendistribusian barang-barang tersebut terpantau dalam kondisi aman dan lancar," pungkasnya. ●arya

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Title  | Pemkab Cianjur Fokus Bangun Infrastruktur Penunjang Produksi Pertanian | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024   |  |
| Media  | Neraca   |  |
| Page   | 9  |  |
| Author | Ant  |  |

# Pemkab Cianjur Fokus Bangun Infrastruktur Penunjang Produksi Pertanian

## NERACA

Cianjur - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, memfokuskan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan produksi pertanian di sejumlah kecamatan di Cianjur, dengan melibatkan berbagai dinas.

Bupati Cianjur Herman Suherman, di Cianjur, Senin (17/6), mengatakan untuk menggenjot produksi pertanian harus ditunjang sarana dan prasarana terutama akses jalan yang baik, sehingga memudahkan aktivitas petani saat membawa hasil panennya.

"Sama halnya dengan penanganan stunting, harus keroyokan termasuk dalam melakukan ketahanan pangan dengan cara meningkatkan hasil produksi padi petani semua dinas akan diarahkan untuk menunjang suksesi pertanian," katanya lagi.

Dia menjelaskan, Dinas PUTR dan Perkim akan diarahkan untuk membangun infrastruktur penunjang pertanian, sehingga aktivitas pertanian di sejumlah kecamatan terutama penghasil padi menjadi lebih mudah.


Infrastruktur yang baik sebagai penunjang aktivitas pertanian di sejumlah wilayah dapat dilalui dengan aman dan nyaman terutama saat panen tiba, sehingga pihaknya akan mengalokasikan anggaran hingga puluhan miliar rupiah di tahun 2024. "Kami akan anggarkan di perubahan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur di sejumlah kecamatan mulai dari utara hingga selatan khususnya di wilayah penghasil padi dan tanaman pangan lainnya," kata Herman.

Sedangkan warga di Kecamatan Bojongpicung yang terkenal dengan kecamatan penghasil padi, berharap jalan penghubung dua desa, Cikondang dan Sukarama yang rusak segera diperbaiki guna meningkatkan perekonomian petani di wilayah tersebut.

Jalan yang menjadi akses distribusi pertanian itu sudah lebih dari 20 tahun belum diperbaiki, landasan jalan yang semula aspal banyak lubang dan banyak terlihat batu berbagai ukuran sebagai landasan jalan, saat musim hujan banyak kubangan di tengah jalan.

"Ini merupakan akses utama untuk distribusi pertanian di dua desa, sehingga keberadaannya sangat vital antara Desa Cikondang dan Sukarama banyak lahan pertanian produktif, ketika akses jalan rusak jadi pendistribusian hasil pertanian terhambat," kata Kepala Desa Cikondang Yusuf Sofyan Zohan.

Pihaknya mewakili warga dari dua desa berharap, Pemkab Cianjur akan segera melakukan perbaikan karena sejak 20 tahun terakhir warga hanya bisa bermimpi, meski panjangnya hanya sekitar 350 meter. ● ant

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Title  | Sektor Keuangan Masih Banyak Dikeluhkan oleh Masyarakat | <br>Kementerian Pertanian |
| Date   | 19 Juni 2024  |  |
| Media  | Neraca  |  |
| Page   | 5   |  |
| Author | Bari/ant  |  |

# Sektor Keuangan Masih Banyak Dikeluhkan oleh Masyarakat

Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan mayoritas laporan masyarakat di sektor perekonomian I yang masuk ke Ombudsman terkait perbankan, asuransi, dan penjaminan atau sektor keuangan. Adapun ruang lingkup dari sektor perekonomian I meliputi perdagangan, perindustrian, logistik, pertanian, pangan, perbankan, asuransi, penjaminan, pengadaan barang-jasa, perpajakan, pabean, serta cukai. "Ada 124 laporan berproses dan yang sudah diselesaikan terkait substansi ini pada periode 2021-2024," ucap Yeka dalam *media briefing update* pengawasan pelayanan publik sektor perekonomian I Ombudsman RI, pekan lalu.

## ■ NERACA

Setelah substansi perbankan, asuransi, dan penjaminan, dia membeberkan substansi perdagangan, industri, dan logistik serta pertanian dan pangan menjadi substansi terbanyak yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman, den-

gan masing-masing sebanyak 75 dan 19 laporan. Selanjutnya, disusul substansi pengadaan barang dan jasa sebanyak 16 laporan serta perpajakan, kepabeanan, dan cukai sebanyak 8 laporan.

Yeka menjelaskan laporan di sektor asuransi cenderung mengenai perso-

alan masyarakat terkait penyalahgunaan dana asuransi di beberapa perusahaan, salah satunya melibatkan PT Asuransi Jiwasraya, hingga membuat perusahaan asuransi itu mengganti nama.

Kemudian laporan di sektor perbankan, lanjut dia, permasalahan yang cenderung diadukan masyarakat ke Ombudsman terkait permasalahan sertifikat, di mana belum adanya penyerahan sertifikat saat cicilan rumah masyarakat sudah lunas. Selain itu, ada pula laporan terkait persoalan kredit pemilikan rumah (KPR) hingga produk keuangan seperti deposito, terutama yang melibatkan oknum sektor keuangan.

Sementara di sektor perdagangan, ia mengungkapkan mayoritas laporan yang masuk salah satunya terkait sistem perdagangan alternatif (SPA), yang memiliki banyak produk hingga lebih dari 300 produk. "Ini banyak sekali dari jenis kripto hing-

ga emas. Di sini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kami anggap kurang responsif terhadap perlindungan nasabah," katanya menjelaskan.

Dengan demikian berdasarkan instansi, kata dia, terdapat pula lima instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman kali ini cenderung terkait sektor keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan 94 laporan, Bappebti 30 laporan, Kementerian Keuangan 16 laporan, serta Kementerian Pertanian 14 laporan.

Lalu, PT Perikanan Indonesia 11 laporan, Kementerian Perdagangan 9 laporan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Bank Tabungan Negara (BTN) masing-masing 5 laporan, serta Kementerian Koperasi dan UKM 4 laporan. ● bari/ant